

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

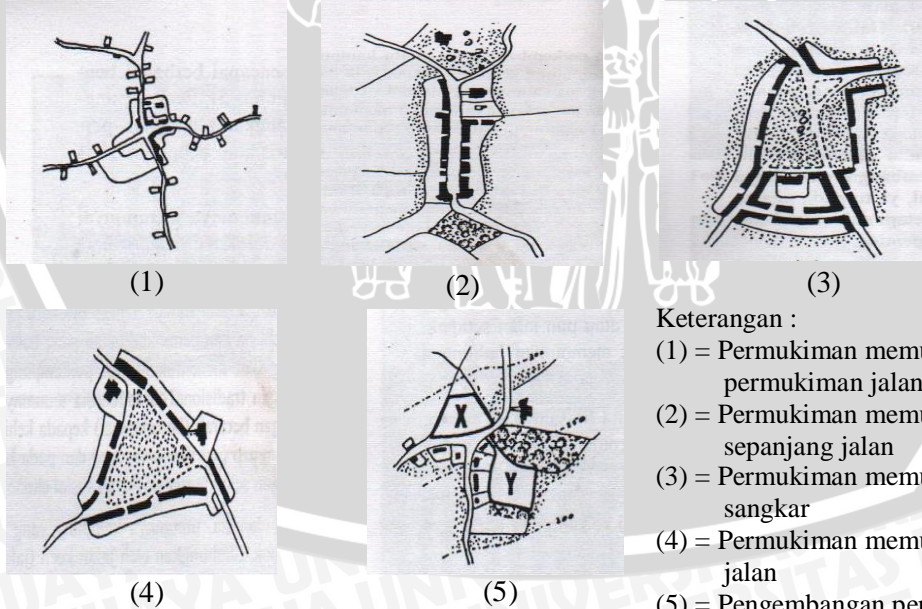
### 2.1 Pola Permukiman dan Bangunan Tradisional

Menurut Koentjaraningrat (1987), bahwa benda-benda hasil karya manusia merupakan wujud kebudayaan fisik, termasuk di dalamnya adalah permukiman dan bangunan tradisional.

#### 2.1.1 Pola permukiman

Jayadinata (1992: 46-51) menjelaskan bahwa pola permukiman terbagi menjadi:

- (a) Permukiman memusat, yakni yang rumahnya mengelompok (*agglomerated rural settlement*), dan merupakan dukuh atau Dusun (*hamlet*) yang terdiri atas kurang dari 40 rumah, dan kampung (*village*) yang terdiri dari 40 rumah atau lebih bahkan ratusan rumah. Di sekitar kampung dan Dusun terdapat tanah bagi pertanian, perikanan, perternakan, pertambangan, kehutanan, tempat penduduk bekerja sehari-hari untuk mencari nafkahnya. Dalam perkembangannya suatu kampung dapat mencapai berbagai bentuk, tergantung kepada keadaan fisik dan sosial. Perkampungan pertanian umumnya mendekati bentuk bujur sangkar.



Keterangan :

- (1) = Permukiman memusat di permukiman jalan
- (2) = Permukiman memusat di sepanjang jalan
- (3) = Permukiman memusat bujur sangkar
- (4) = Permukiman memusat belokan jalan
- (5) = Pengembangan permukiman memusat

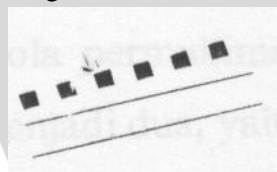
Sumber: Jayadinata, (1992: 49)

**Gambar 2.1** Pola permukiman memusat.

- (b) Permukiman terpecar, yang rumahnya terpecar menyendiri (*disseminated rural settlement*) terdapat di negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan sebagainya. Perkampungan terpecar di negara itu hanya terdiri atas *farmstead*, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak. Kadang-kadang terdapat *homestead* yaitu rumah terpencil (Jayadinata, 1992: 46-51).

Bentuk pola permukiman menurut Sri Narni dalam Mulyati (1995), antara lain (Gambar 2.2):

1. Pola permukiman memanjang (linier satu sisi) di sepanjang jalan baik di sisi kiri maupun sisi kanan saja;
2. Pola permukiman sejajar (linier dua sisi) merupakan permukiman yang memanjang di sepanjang jalan;
3. Pola permukiman *cul de sac* merupakan permukiman yang tumbuh di tengah-tengah jalur melingkar;
4. Pola permukiman mengantong merupakan permukiman yang tumbuh di daerah seperti kantong yang dibentuk oleh jalan yang memagarnya;
5. Pola permukiman *curvalinier* merupakan permukiman yang tumbuh di daerah sebelah kiri dan kanan jalan yang membentuk kurva; dan
6. Pola permukiman melingkar merupakan permukiman yang tumbuh mengelilingi ruang terbuka kota.



Pola memanjang



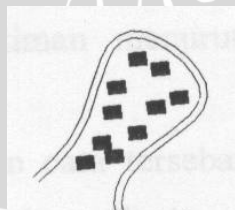
Pola sejajar



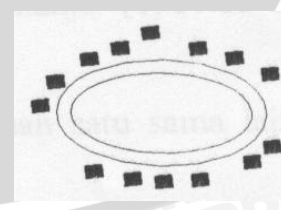
Pola *cul de sac*



Pola *curvalinier*



Pola mengantong



Pola melingkar

Sumber: Sri Narni dalam Mulyati (1995)

**Gambar 2. 2 Bentuk pola permukiman.**

Permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar norma-norma tradisi (Rapoport dalam Dewi



(2008: 31). Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah (Crysler *dalam* Sasongko 2005:1). Menurut Norberg-Schulz *dalam* Sasongko (2005), bahwa struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan mungkin secara fisik ataupun non fisik yang tidak hanya mementingkan orientasi saja tetapi juga objek nyata dari identifikasi. Wikantiyoso *dalam* Krisna (2005:17) menambahkan bahwa permukiman tradisional adalah aset kawasan yang dapat memberikan ciri ataupun identitas lingkungan. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan, tatanan lingkungan binaan, ciri aktifitas sosial budaya dan aktifitas ekonomi yang khas. Pola tata ruang permukiman mengandung tiga elemen, yaitu ruang dengan elemen penyusunnya (bangunan dan ruang disekitarnya), tatanan (*formation*) yang mempunyai makna komposisi sera *pattern* atau model dari suatu komposisi.

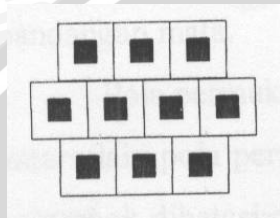
Dwi Ari & Antariksa (2005:79) menyatakan bahwa permukiman tradisional memiliki pola-pola yang membicarakan sifat dari persebaran permukiman sebagai suatu susunan dari sifat yang berbeda dalam hubungan antara faktor-faktor yang menentukan persebaran permukiman. Terdapat kategori pola permukiman tradisional berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pola permukiman bentuk memanjang terdiri dari memanjang sungai, jalan, dan garis pantai;
2. Pola permukiman bentuk melingkar;
3. Pola permukiman bentuk persegi panjang; dan
4. Pola permukiman bentuk kubus.

Pola permukiman tradisional berdasarkan pada pola persebarannya juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pola menyebar dan pola mengelompok. Pola spasial permukiman menurut Wiriadmadja (1981: 23-25) (Gambar 2.3.), sebagai berikut:

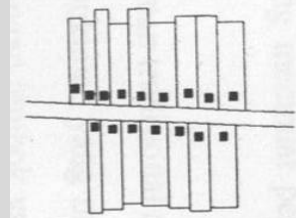
- a. Pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu sama lain, terutama terjadi dalam daerah yang baru dibuka. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya jalan besar, sedangkan orang-orang mempunyai sebidang tanah yang selama suatu masa tertentu harus diusahakan secara terus menerus;

- b. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, memanjang mengikuti jalan lalu lintas (jalan darat/sungai), sedangkan tanah garapan berada di belakangnya;
- c. Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah kampung/desa, sedangkan tanah garapan berada di luar kampung; dan
- d. Berkumpul dan tersusun melingkar mengikuti jalan. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, mengikuti jalan yang melingkar, sedangkan tanah garapan berada di belakangnya.



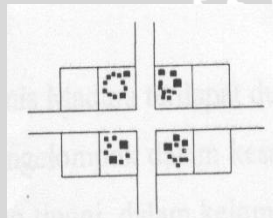
**Tersebar dan berjauhan**

- Permukiman berada di tengah tanah garapan
- Belum ada jalan besar



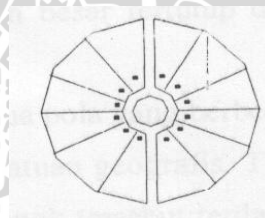
**Berkumpul dan tersusun memanjang mengikuti jalan**

- Permukiman berderet sepanjang jalan
- Tanah garapan berada dibelakangnya



**Berkumpul dan menggerombol**

- Permukiman mengelompok dalam kampung
- Tanah garapan berada diluarnya



**Berkumpul dan tersusun melingkar mengikuti jalan**

- Permukiman berderet sepanjang jalan yang melingkar
- Tanah garapan berada dibelakangnya

Sumber: Wiriadmadja (1981)

**Gambar 2. 3 Tipe-tipe pola permukiman pedesaan.**

Menurut Widayati (2002) rumah merupakan bagian dari suatu permukiman. Rumah saling berkelompok membentuk permukiman dengan pola tertentu. Pengelompokan permukiman dapat didasari atas dasar :

- Kesamaan golongan dalam masyarakat, misalnya terjadi dalam kelompok sosial tertentu antara lain kompleks kraton, kompleks perumahan pegawai.
- Kesamaan profesi tertentu, antara lain desa pengrajin, perumahan dosen, perumahan bank.
- Kesamaan atas dasar suku bangsa tertentu, antara lain kampung Bali, kampung Makasar.



Untuk menciptakan permukiman atau kampung pada suatu wilayah dapat dilakukan dengan dua tindakan, yaitu pertama dengan membuka hutan disebut *mbabat*. Kedua, dengan menampilkan tokoh yang membentuk tatanan dari suatu kekacauan (Aliyah, 2004:35). Menurut Aliyah (2004:35) elemen-elemen pembentuk karakter kampung/permukiman tradisional di Jawa, yaitu sebagai berikut:

1. Riwayat terbentuknya (legenda/sejarah kampung) yang secara fisik dapat dikenali dengan keberadaan situs.
2. Tokoh yang membentuk tatanan dari suatu kekacauan. Seseorang yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu menaklukkan lahan yang akan dijadikan permukiman dari kekuasaan makhluk halus penguasa hutan.
3. Kelompok masyarakat dalam kesatuan tatanan bermukim.
4. Susunan tata masa atau komposisi bangunan hunian, karena tata masa bangunan Jawa memiliki aturan atau patokan tersendiri, sehingga berpengaruh pada komposisi bangunan dalam kampung.
5. Batas teritori wilayah kekuasaan pribadi (lahan). Perbedaan ruang publik dan ruang privat sangat kuat, sehingga ada tuntunan pembatas teritori, dan memiliki aturan dalam penempatan pintu sebagai penghubung.
6. Besaran lahan atau ukuran luas tapak. Ukuran ditentukan oleh tingkat status sosial dan derajat sang penghuni.
7. Bentuk dan ukuran pagar yang ditentukan oleh status sosial masyarakat yang menghuni.
8. Bentuk dan ukuran bangunan rumah tinggal. Hal ini ditentukan oleh status sosial sang penghuni.

### **2.1.2 Bangunan tradisional**

Selain permukiman tradisional, kebudayaan fisik lainnya terlihat dari bentuk bangunan tradisional yang biasanya diterapkan pembangunannya melalui rumah tradisional. Menurut Machmud (2006:180), rumah tradisional dapat diartikan sebuah rumah yang dibangun dengan cara yang sama oleh beberapa generasi. Istilah lain untuk rumah tradisional adalah rumah adat atau rumah rakyat. Kriteria dalam menilai keaslian rumah-rumah tradisional antara lain kebiasaan-kebiasaan yang menjadi suatu peraturan yang tidak tertulis saat rumah didirikan ataupun mulai digunakan. Ada ritual-ritual tertentu misalnya upacara pemancangan tiang pertama, selamatan/kenduri dan penentuan waktu yang tepat. Selain hal tersebut, masih banyak tata cara atau aturan

yang dipakai, misalnya arah hadap rumah, bentuk, warna, motif hiasan, bahan bangunan yang digunakan, sesajen, doa atau mantra yang harus dibaca dan sebagainya sangat erat terkait pada rumah tradisional.

Bangunan arsitektur tradisional mempunyai beberapa ciri yang dapat dilihat secara visual. Ciri-ciri ini hampir semuanya terdapat di beberapa daerah di Indonesia, namun adakalanya beberapa lokasi sedikit mempunyai perbedaan. Beberapa ciri arsitektur tradisional antara lain (Utomo 2000 dalam Dewi, 2008:33-35):

- Berlatar belakang religi

Keberadaan bangunan arsitektur tradisional tidak lepas dari faktor religi, baik secara konsep, pelaksanaan pembangunannya maupun wujud bangunannya. Hal ini disebabkan oleh cara pandang dan konsep masyarakat tradisional dalam menempatkan bagian integral dari alam (bagian dari tata sistem kosmologi), yaitu alam raya, besar (makroskopis) dan alam kecil (mikroskopis), yang diupayakan oleh masyarakat tradisional adalah bagaimana agar kestabilan dan keseimbangan alam tetap terjaga. Bentuk perujukan dengan alam tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- Menganggap arah-arah tertentu memiliki kekuatan magis

Menganggap arah-arah tertentu mempunyai kekuatan magis bukanlah satu hal yang asing di dunia arsitektur tradisional (juga di Indonesia). Mereka mengenal arah mana yang dianggap baik dan arah mana yang dianggap buruk atau jelek. Adapula yang menghubungkan arah ini dengan simbolisme dunia (baik dan suci), tengah (sedang) dan bawah (jelek, buruk, kotor). Arah-arah baik ini mempengaruhi pola tata letak bangunan dalam satu tapak. Bangunan-bangunan harus dihadapkan pada arah baik dan membelakangi arah buruk.

- Menganggap ruang-ruang tertentu memiliki kekuatan magis

Adakalanya bangunan-bangunan tertentu di dalam bangunan dianggap mempunyai nilai sakral. Kesakralan ini diwujudkan dengan memberikan nilai lebih dalam suatu ruangan. Ruangan ini dianggap sakral, suci seperti yang terjadi dalam arsitektur tradisional Jawa. *Senthong tengah* pada bangunan rumah tinggal di Jawa dianggap sebagai ruang suci dan sakral dibandingkan dengan ruang lainnya.



- Pengaruh hubungan kekeluargaan/ kemasyarakatan

Hubungan kekeluargaan dalam struktur masyarakat tradisional dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria. Berdasarkan pertalian darah (*genealogi*) kelompok masyarakat tradisional dibedakan menjadi:

  - Sistem bilateral atau parental

Kesatuan keluarga dalam sistem ini terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Di dalam perkembangannya jumlah anggota keluarga pada sistem ini semakin lama semakin banyak, sehingga anggota keluarga yang tinggal bersama akan semakin besar, bahkan sampai rumah tinggal mereka tidak memuatnya lagi.
  - Sistem unilateral

Susunan keluarga dalam sistem ini ditarik dari garis keturunan hanya dari pihak ayah saja (*patrilineal/ patrilokal*) atau dari pihak ibu (*matrilokal*).
- Pengaruh iklim tropis lembab

Karena posisi Indonesia berada pada zona yang beriklim tropis lembab, maka mau tidak mau keberadaan arsitektur tradisional harus merujuk kepada iklim tropis lembab. Konsep adaptasinya terhadap iklim setempat yang diterapkan pada bangunan rumah tinggalnya, diyakini sebagai salah satu contoh yang baik. Susunan massa, arah hadap (*orientasi*), pemilihan bentuk atap, pemilihan bahan bangunan, teknik komposisi, semuanya benar-benar diperhitungkan terhadap aspek iklim tropis sedemikian sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah.

### 2.1.3 Contoh permukiman tradisional

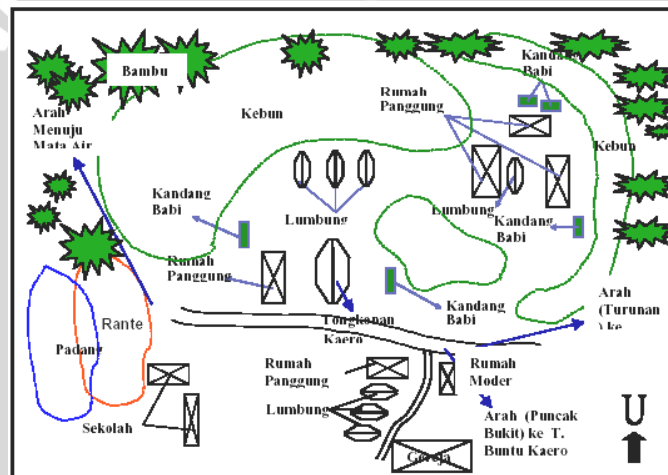
Berikut ini merupakan beberapa contoh permukiman tradisional di Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat masyarakatnya yang digunakan sebagai dasar untuk mengungkap karakteristik permukiman di wilayah studi.

#### 1. Permukiman tradisional Kaero Kecamatan Sanggalla, Toraja.

Permukiman tradisional Kaero dapat dikategorikan dalam tipe permukiman yang berada di dataran tinggi. Rumah-rumah hunian penduduk dalam permukiman sebagian besar adalah rumah panggung di bangun berpencair dari lereng hingga lembah bukit, namun jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya berdekatan. *Tongkonan* dan lumbung (*alang*) dibangun menghadap utara selatan, sedangkan rumah-rumah penduduk tidak semuanya menghadap ke utara. Area permukiman Kaero tertutup oleh pohon bambu dan cemara yang tumbuh dengan subur dan lebat di sekitar permukiman.

Elemen-elemen dalam permukiman tradisional, seperti *tongkonan*, lumbung (*alang*), kandang, kebun (*pa'la'*), *rante*, sawah, dan *liang* menggambarkan kondisi dari permukiman aslinya. Dalam permukiman tradisional Kaero terdapat dua *tongkonan*, yaitu *Tongkonan Kaero* dan *Tongkonan Buntu Kaero*. Lokasi *Tongkonan Kaero* berada di lereng bukit, sedangkan *Tongkonan Buntu Kaero* terletak di atas bukit sebelah selatan dan tidak jauh lokasinya dari lokasi *Tongkonan Kaero* (Gambar 2.4).

*Tongkonan Buntu Kaero* dan *Tongkonan Kaero* tidak dibangun dalam waktu yang bersamaan. *Tongkonan* yang mula-mula dibangun di Kaero adalah *Tongkonan Buntu Tongko* yang merupakan cikal bakal pusat permukiman di Kaero, baru kemudian dibangun *Tongkonan Kaero*. Di sekitar kedua *tongkonan* tersebut terdapat rumah-rumah kediaman oleh penduduk yang masih terikat secara kekeluargaan atau keturunan dari pemilik *tongkonan* tersebut.



Sumber: Syahmusir (2005:244)

**Gambar 2.4 Permukiman Kaero.**

## 2. Permukiman Desa Adat Legian Bali

Pola Desa Adat Legian tergolong linear, desa ini membujur arah utara-selatan, dengan batas di sebelah utara adalah Desa Adat Seminyak, dan di sebelah selatan adalah Desa Adat Kuta. Di sebelah timur adalah Sungai Tukad Mati dan persawahan, sedangkan di sebelah barat adalah laut (Samudera Indonesia) (Gambar 2.5).

### a. Parahyangan (Kahyangan Tiga Kahyangan Desa)

*Kahyangan tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) masing-masing berada di lokasi tersendiri (tidak ada yang bergabung di suatu tempat). Dilihat dari tata nilai *luan-teben* (Utara-Selatan) terlihat bahwa Pura Desa terletak paling utara di antara ketiga pura tersebut. Pura Puseh di tengah, dan Pura Dalem serta *setra* di *teben* (Selatan). Jadi, baik Pura Puseh maupun Pura Desa tidak benar-benar terletak di *luan*



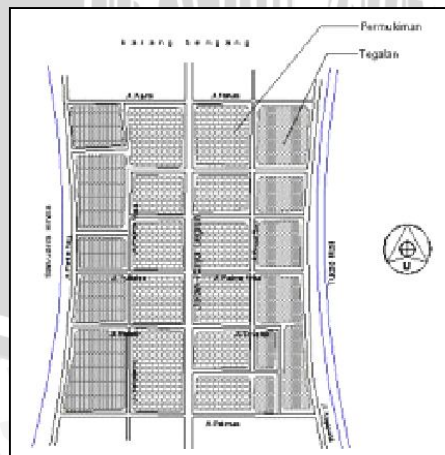
*wewidangan* desa, melainkan di tengah-tengah. Sedangkan Pura Dalem terletak benar-benar di *teben* (di ujung selatan *wewidangan* desa). Selain dari pada *kahyangan* tiga tersebut, masih ada beberapa pura yang termasuk *kahyangan desa*, yaitu Pura Agung dan Pura Penataran. Pura Agung terletak juga di tengah-tengah desa, di sebelah Utara Pura Desa. Dengan demikian Pura Agung menempati daerah paling *luan* dibandingkan dengan pura-pura *kahyangan* desa lainnya. Pura Penataran terletak di antara Pura Puseh dan Pura Dalem.

#### b. Pawongan

Fasilitas tempat tinggal penduduk Desa Adat Legian terletak di sepanjang desa yang membujur arah Utara-Selatan. Adanya jalan utama yang terletak di tengah-tengah desa, merupakan poros yang kuat, menegaskan gambaran pola desa linear. Rumah-rumah penduduk merapat di pinggir jalan sepanjang desa. Rumah yang berada langsung di pinggir jalan semuanya menghadap ke jalan. Artinya memiliki akses langsung ke jalan dengan pemesuan berupa *angkul-angkul* atau *kori*. Rumah-rumah di bagian belakang, menghadap ke *rurung* (gang). Gang tersebut berada di sebelah Selatan dari rumah tinggal dimaksud. Jadi semua pemesuan di gang berada di sisi selatan dari masing-masing unit permukiman.

#### c. Palemahan

Jelas terlihat bahwa *palemahan* Desa Adat Legian umumnya berupa tegalan yang terletak di belakang tempat tinggal penduduk baik yang di sebelah barat jalan, maupun yang di sebelah timur, tegalan merupakan *palemahan* yang keberadaannya terlihat dengan jelas. Kuburan/*setra* terletak di daerah paling selatan (*teben*) desa.



Sumber: Setiada (2003:63)

**Gambar 2.5 Pola Desa Adat Legian.**

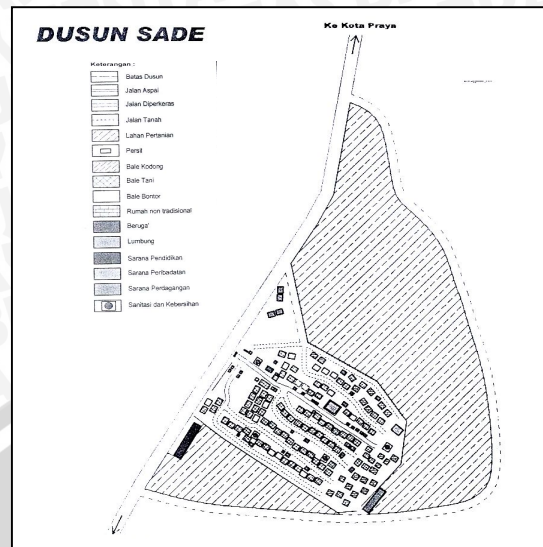
### 3. Pola permukiman dan bangunan Dusun Sade, Lombok Tengah

Permukiman di Dusun Sade dibatasi oleh pagar hidup berupa pohon dan bambu, sehingga tampak jelas antara permukiman dengan lahan pertanian penduduk. Pencapaian ke permukiman tersebut dapat melalui jalan masuk sebelah utara (*jeba' bale'*) dan jalan masuk sebelah barat (*jeba' bare*) (Gambar 2.6).

Pada awalnya, di permukiman ini terdapat tiga pintu masuk dan keluar, yaitu dua pintu (*jeba' bale'* di sisi utara dan *jeba' muri* di sisi timur) digunakan untuk manusia, sedangkan satu pintu digunakan untuk hewan ternak. Adanya tiga pintu ini dikaitkan dengan kepercayaan masyarakatnya, dua pintu untuk manusia sebagai jalan masuk dan keluar roh-roh baik yang dipercaya membawa berkah dan keselamatan, sedangkan pintu untuk hewan ternak dipercaya sebagai jalan masuk roh-roh jahat yang membawa kesengsaraan dan penyakit.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan penambahan jumlah rumah maka pada tahun 1980 *jeba' muri* terpaksa ditutup, sedangkan *jeba' bale'* dan *jeba' bare* masih tetap digunakan hingga kini. Dengan adanya kegiatan pariwisata di dusun Sade mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi *jeba' bare* dari jalan masuk ternak menjadi jalan masuk bagi manusia, khususnya wisatawan yang berkunjung ke dusun tersebut. Perubahan fungsi ini berdampak terhadap kualitas jalan, yaitu dari jalan tanah menjadi jalan dengan perkerasan batu. Permukiman di Dusun Sade terdapat bangunan-bangunan tradisional yang dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu *Bale Kodong* untuk pasangan yang baru menikah, *Bae Tani* untuk keluarga yang sudah agak mapan, dan *Bale Bontor* untuk keluarga yang sudah mapan. Letak rumah-rumah di Dusun Sade berjajar membentuk pola linier dengan sebagian besar berorientasi ke arah jalan setapak yaitu arah timur dan barat yang merupakan arah matahari dan dipercaya sebagai pemberi berkah. Rumah-rumah di Dusun Sade berpantangan untuk menghadap utara dan selatan. Pola linier tersebut juga berkaitan dengan adanya pengelompokan keluarga yang disebabkan oleh adat menetap masyarakat Sasak (Krisna, 2005:128-131).





Sumber: Krisna (2005:130)

**Gambar 2. 6** Pola permukiman Dusun Sade.

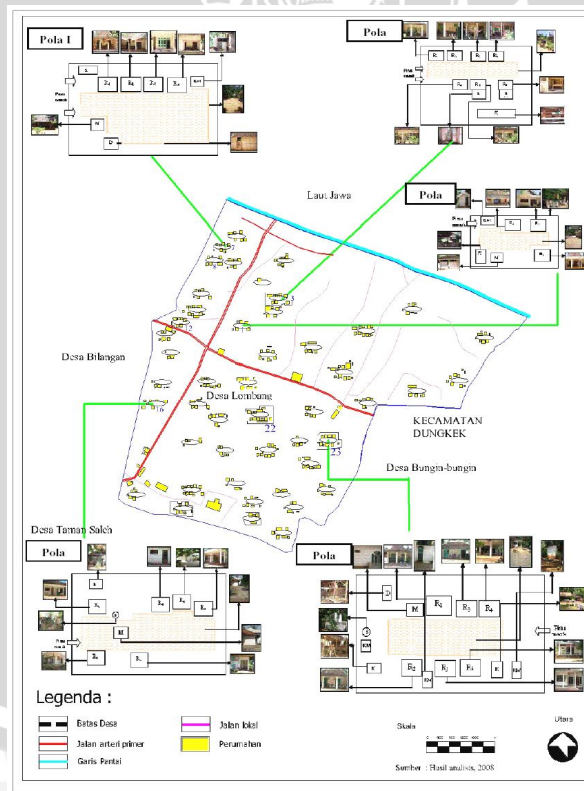
#### 4. Pola permukiman masyarakat Pedukuhan Cora Cotto<sup>2</sup>, Bondowoso

Pola permukiman masyarakat di Pedukuhan Cora Cotto<sup>2</sup> lebih ditekankan pada sosial budaya dan perilaku masyarakatnya. Hampir dari seluruh masyarakat Pedukuhan Cora Cotto<sup>2</sup> adalah berkerabat, sehingga rasa kekeluargaan dan gotong royong antar masyarakatnya masih terasa kental. Kebudayaan yang dipegang teguh dari jaman nenek moyang menuntun masyarakat pada kehidupan religi yang kuat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *Behavior Mapping* yang memperoleh gambaran pola permukiman secara mikro, meso dan makro yang terbentuk akibat adanya aktivitas sosial, budaya dan kebiasaan masyarakat. Ruang mikro merupakan gambaran segala jenis kegiatan yang menggunakan ruang dalam rumah, ruang meso merupakan gambaran kegiatan lanjutan dari kegiatan mikro yang biasanya dilakukan di halaman rumah, dan ruang makro merupakan lanjutan dari kegiatan meso yang mempunyai keterkaitan anatar kegiatan yang ada di pekarangan dengan tempat-tempat umum. Adanya faktor budaya, sosial dan kebiasaan masyarakat tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap bentuk pola pedukuhan. Pola yang ada yaitu menyebar secara acak dan cenderung tidak berkaitan dengan adanya ketiga unsur tersebut. Tetapi dibalik dari bentuk yang tidak berpola, ada beberapa bagian yang dapat dilihat sebagai pola permukiman masyarakat yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh unsur budaya, sosial dan kebiasaan (Eliana 2007:217) (Gambar 2.7).





Hasil temuan tipologi pola susunan *taneyan* di Desa Lombang dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) pola perumahan, antara lain Tipologi I (pola perumahan Madura asli), merupakan pola perumahan *taneyan lanjhang* dengan kelengkapan rumpun *taneyan*; Tipologi II, merupakan pola perumahan *Taneyan Lanjhang* yang letak rumah *tongghunya* menyimpang (tidak menghadap ke selatan) atau arah penambahan bangunan menyimpang (tidak ke arah timur), atau tidak memiliki bangunan dapur tersendiri atau ketiga-tiganya; Tipologi III, merupakan pola perumahan *Taneyan Lanjhang* yang tidak memiliki bangunan *langgar* dan dapur dalam kelengkapan rumpun *taneyan*-nya; Tipologi IV, merupakan pola perumahan *Taneyan Lanjhang* seperti kriteria tipologi pada tipologi II, dan dalam kelengkapan rumpun *taneyan*-nya arah hadap rumah *tongghu* yang menyimpang (tidak menghadap ke selatan dan atau arah penambahan bangunan tidak ke arah timur); Tipologi V, merupakan pola perumahan *Taneyan Lanjhang* yang rumah *tongghu*-nya tidak menghadap ke selatan dan atau arah penambahan bangunannya tidak ke arah timur (Gambar 2.8).



Sumber: Dewi (2008:108)

**Gambar 2. 8** Pola permukiman pola perumahan *Taneyan Lanjhang* di Desa Lombang.

#### 6. Permukiman perdesaan di Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto

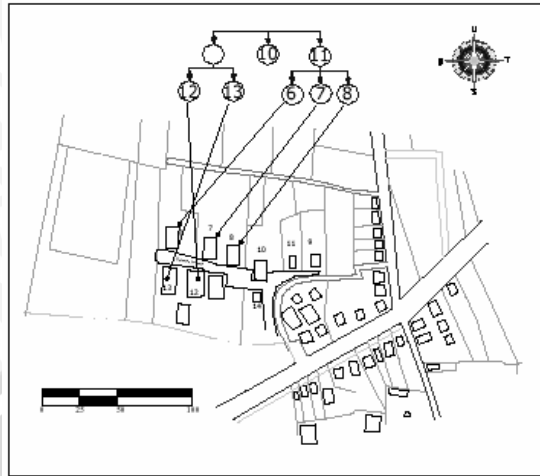
Desa Trowulan merupakan bekas pusat Kota Majapahit dihuni oleh penduduk dengan agama yang beragam. Pola permukiman yang ada di Desa Trowulan mampu menggambarkan lingkungan alami, tingkatan teknologi yang digunakan untuk membangun dan interaksi sosial sebagai alat kontrol budaya masyarakat yang ada di desa tersebut. Desa Trowulan termasuk pada tipologi desa persawahan. Dengan pola permukiman yang linier terdiri atas pola permukiman linier dan memusat. Pada tiap dusunnya terdapat pola hunian sebagai berikut:

- Mengumpul dengan orientasi rumah adalah halaman yang digunakan secara bersama (komunal);
- Linier dengan orientasi rumah adalah jalan; dan
- Linier memusat dengan orientasi rumah adalah jalan dan secara geografis cenderung terpisah dengan dusun yang lain.

Tipologi atap rumah terdiri atas pelana dan limasan, dan sebagian besar pemiliknya mempunyai pekerjaan petani. Secara umum, rumah-rumah yang ada di Desa Trowulan mempunyai fungsi antara lain sebagai hunian dan berfungsi ganda, yaitu sebagai hunian dan tempat usaha. Fungsi rumah tersebut berubah sesuai dengan kebutuhan pemiliknya. Pada umumnya rumah yang berfungsi ganda, yaitu sebagai hunian serta tempat usaha, tempat usahanya dibangun di depan rumah dengan skala pelayanannya adalah skala lokal desa. Lahan yang dipakai biasanya adalah teras atau halaman di depan rumah (Permatasari, 2008:77-93).

Sistem hubungan kekerabatan masyarakat Desa Trowulan sama seperti masyarakat Jawa pada umumnya, yaitu bilateral. Sistem kekerabatan bilateral adalah suatu prinsip yang menentukan hubungan kekerabatan seseorang berlaku rangkap, yaitu melalui garis keturunan pria dan garis keturunan wanita (Gambar 2.9). Dengan demikian hubungan anak dengan kerabat pihak ayah dan ibu mempunyai derajat yang sama (Koentjaraningrat 1975:86).



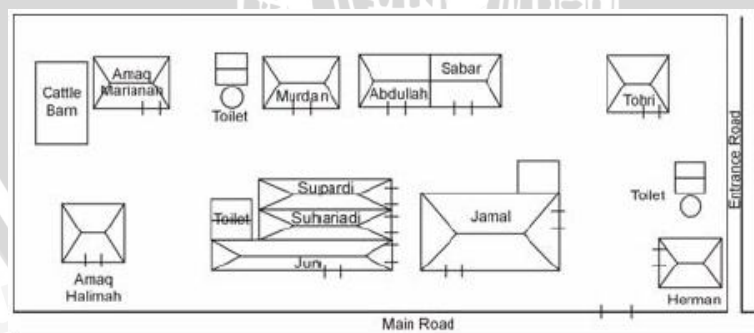


Sumber: Permatasari (2008:89)

**Gambar 2. 9 Hubungan kekerabatan permukiman di Desa Trowulan.**

7. Struktur ruang permukiman Desa Puyung

Permukiman di Desa Puyung sebagian besar terbentuk dari rumpun keluarga dan pada beberapa bagian berupa rumah tunggal. Pola yang terbentuk adalah merupakan pengelompokan yang membentuk *cluster* baik sebagai rumpun keluarga maupun sebagai dusun. Kepercayaan supra natural masih nampak dalam kehidupan masyarakat Desa Puyung. Dalam menentukan orientasi bangunan khususnya arah dan hadap rumah, masih menghendaki menghadap Utara atau ke Gunung Rinjani, atau juga berpola sejajar jalan. Antara satu rumah dengan rumah lain dalam satu rumpun keluarga diperhitungkan agar bisa menghadap lorong dalam rumpun keluarga. Peran senioritas dalam keluarga juga nampak, yakni orang tua ditempatkan pada bagian atas atau utara, sedangkan anak di bawah atau sampingnya (Gambar 2.10).

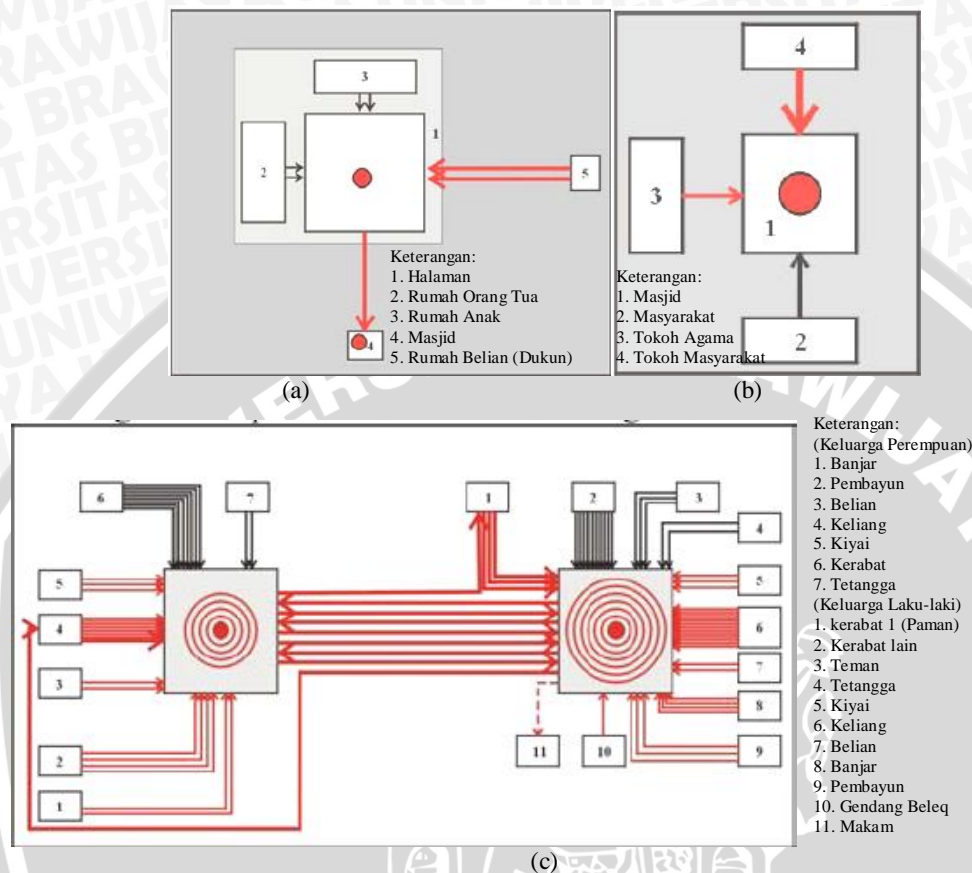


Sumber: Sasongko (2005:4)

**Gambar 2. 10 Pola perumahan yang berjajar dengan arah atap sejajar jalan.**

Sesuai dengan adat Sasak umumnya, masyarakat Puyung juga melaksanakan berbagai ritual, terutama terkait dengan acara daur hidup, acara keagamaan, ataupun waktu membangun rumah, membuka tanah untuk kegiatan baru. Diantara ritual ini yang

mengalami peristiwa rutin dan tetap dipentingkan adalah terkait daur hidup, terdiri atas ritual: kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian, serta ritual terkait keagamaan, khususnya Maulid Nabi Muhammad dan Lebaran Ideul Fitri (Gambar 2.11).



Sumber: Sasongko (2005:5-7)

**Gambar 2. 11 (a) Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan ritual kelahiran; (b) Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan ritual perkawinan; (c) Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan Maulid Nabi.**

## 2.2 Adat dan Kebudayaan

### 2.2.1 Pengertian adat

Adat adalah bagian ideel dari kebudayaan, yang dapat disebut adat tatakelakuan karena adat sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dibagi dalam empat tingkat, yaitu antara lain (Koentjaraningrat, 1984:11-13):

1. Tingkat nilai-budaya, berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.
2. Tingkat norma-norma, nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.
3. Tingkat hukum, sistem hukum baik hukum adat maupun hukum tertulis.
4. Tingkat aturan khusus, mengatur aktifitas-aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungnya dalam kehidupan masyarakat.



Adat istiadat (*custom*) secara harfiah berarti praktek–praktek berdasarkan kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok (Machmud, 2007:180). Adat istiadat adalah bentuk konvensional perilaku orang dalam situasi–situasi tertentu, yang mencakup: metode–metode kerja yang diterima, relasi timbal balik antara anggota dalam kehidupan setiap hari dan dalam keluarga; tatacara diplomatik, agama dan tindakan–tindakan yang mencerminkan ciri–ciri spesifik kehidupan suatu suku, kelas, masyarakat. Adat istiadat mempunyai kekuatan dari suatu kebiasaan sosial dan mempengaruhi perilaku seseorang sehingga secara moral dapat dievaluasi.

Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang kehidupan sehari–harinya mengacu pada tatanan adat turun temurun. Tatanan adat yang diturunkan oleh nenek moyangnya diyakini sebagai jalan hidup yang baik sehingga dengan mengikuti tatanan hidup tersebut seseorang akan menjadi manusia yang berkualitas dan akan selalu mendapatkan berkah dari yang maha Kuasa. Komunitas adat biasanya mempunyai wilayah atau *lokus* tertentu yang tidak dibatasi oleh batas–batas administrasi modern seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan negara (Hastanto, 2007).

### **2.2.2 Pengertian kebudayaan**

Menurut Budhisantoso *dalam* Krisna (2005:15), kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber–sumber alam yang ada di sekitarnya. Kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan–tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan, baik sebagai makhluk biologis maupun makhluk budaya.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat–istiadat dan kemampuan–kemampuan serta kebiasaan–kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Taylor *dalam* Soekanto, 2003:172).

### **2.2.3 Unsur–unsur kebudayaan**

Koentjaraningrat (1987:12) menyebutkan karakteristik atau bentuk kebudayaan sebagai suatu unsur–unsur yang universal. Unsur–unsur kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan, yaitu sistem kepercayaan dengan segala bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari–hari.

2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan, yaitu adanya tatanan masyarakat yang mempunyai pola hubungan tertentu, misalnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan;
3. Sistem pengetahuan, yaitu hasil daya cipta, karya, dan karsa manusia.
4. Bahasa yaitu alat komunikasi yang digunakan golongan masyarakat.
5. Kesenian, berbagai bentuk seni (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
6. Mata pencaharian hidup, yaitu sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
7. Sistem teknologi dan peralatan, yaitu produk ciptaan manusia berdasarkan ilmu.

Menurut Koentjaraningrat (1987:12) unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat selanjutnya akan terwujud menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, norma-norma dan peraturan yang bersifat abstrak, disebut sebagai *culture system*.
2. Kebudayaan sebagai kompleks aktifitas kekuatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, bersifat lebih konkrit dan disebut sebagai *social system*.
3. Kebudayaan benda-benda hasil karya manusia (artefak), mempunyai sifat paling konkrit, dapat diraba, diobservasi dan didokumentasi, disebut sebagai kebudayaan fisik atau *physical culture*.

Pembentuk kebudayaan menurut Rapoport dalam Krisna (2005: 16) dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal berikut:

1. Lokasi, yaitu keberadaan fisik yang diwujudkan dalam suatu lokasi.
2. Berhubungan dengan bentang alam, yaitu adanya unsur *landscape* dengan fungsi tertentu.
3. Mempunyai elemen khusus, yaitu terdapat unsur fisik khusus yang menjadi ciri.
4. Mempunyai letak yang khusus, yaitu penempatan ruang dengan maksud tertentu.
5. Mempunyai ruang dari tipe yang khusus, yaitu fungsi atau jenis ruang sesuai dengan penggunaannya.
6. Diberi nama dengan cara yang khusus, yaitu landasan pemberian nama pada unsur fisik kawasan.
7. Menggunakan sistem orientasi yang khusus, yaitu sistem orientasi sebagai landasan pembangunan fisik.
8. Mempunyai warna, tekstur dan sebagainya yang khusus, yaitu penggunaan warna, tekstur yang khas sebagai bagian dari karakter fisiknya.



9. Mempunyai suara, bau, temperatur dan gerakan udara, yaitu karakteristik yang tidak terlihat.
10. Mempunyai orang yang pasti menarik dalam aktifitas yang khusus, yaitu pelaksanaan aktifitas masyarakat menarik perhatian karena kegiatan yang dilakukannya.

#### 2.2.4 Budaya dalam struktur ruang permukiman

Rapoport *dalam* Wikantiyoso (1997:26) mengemukakan bahwa permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar norma–norma tradisi. Lawson *dalam* Sasongko (2002:119) menambahkan bahwa beberapa norma–norma tersebut mungkin murni dari kesepakatan warga, tetapi sebagian besar lainnya adalah dari kebutuhan dan karakter masyarakatnya sendiri (sebelum perancangan disusun secara profesional), perancangan dan kreatifitas ruang lebih bersifat sosial dan *vernakular* serta terlihat lebih memperhatikan aspek budaya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wikantiyoso (1997:26-29) juga menambahkan bahwa permukiman tradisional adalah aset kawasan yang dapat memberikan ciri ataupun identitas lingkungan. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan, tatanan lingkungan binaan, ciri aktifitas sosial budaya dan aktifitas ekonomi yang khas. Pola tata ruang permukiman mengndung tiga elemen, yaitu ruang dengan elemen–elemen penyusunnya (bangunan dan ruang disekitarnya), tatanan (*formation*) yang mempunyai makna komposisi serta *pattern* atau model dari suatu komposisi.

Menurut Habraken *dalam* Wikantiyoso (1997:27), sebagai suatu produk komunitas, bentuk lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Artinya komunitas yang berbeda tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Suatu rumah dirancang dan suatu permukiman di tata menggambarkan hubungan antara individu, keluarga dan komunitasnya yang tentu saja bergantung pada masing–masing budaya. Konsekuensinya adalah organisasi ruang dirumah, tatanan permukiman dan akses ke fasilitas umum dipengaruhi oleh pandangan hidup komunitas tesebut.

Yi-Fu Tuan (1977) menyatakan untuk menjelaskan makna dari organisasi ruang dalam konteks tempat (*place*) dan ruang (*space*) harus dikaitkan dengan budaya. Budaya sifatnya unik, antara satu tempat dengan tempat lain bisa sangat berbeda

maknanya. Selanjutnya manusia akan mengekspresikan dirinya pada lingkungan tempat dia hidup, sehingga lingkungan tempat tinggalnya akan diwujudkan dalam berbagai simbolisme sesuai dengan budaya mereka. Bagaimana manusia memilih tempat tertentu dan menggunakan berbagai kelengkapan, ataupun berbagai cara untuk berkomunikasi pada dasarnya merupakan “bahasa” manusia. Pola ini tidaklah semata dilihat dalam kaitan dengan lingkungan semata, akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga merupakan perwujudan budaya mereka (Locher 1978 dalam Sasongko 2005:2-3).

Struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, dan batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan yang muncul dalam lingkungan binaan mungkin secara fisik atau non fisik. Untuk membentuk struktur ruang tidak hanya *orientation* yang terpenting, tetapi juga objek nyata dari suatu identifikasi. Dalam suatu lingkungan tempat suci berfungsi sebagai pusat yang selanjutnya menjadi orientasi dan identifikasi bagi manusia, dan merupakan struktur ruang (Norberg-Schulz 1979 dalam Sasongko 2005:2-3).

Secara lebih nyata struktur ruang permukiman tradisional di Korea menunjukkan tatanan ruang permukiman sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, mulai dari pemilihan lokasi sampai struktur ruang itu sendiri. Pemilihan ruang untuk permukiman ditentukan dari falsafah *feng-shui*, yakni lokasi terbaik adalah diantara gunung dan sungai (Han 1991). Perumahan di Korea dalam satu desa bisa merupakan perumahan keluarga atau *clan houses*. Dalam menempatkan rumah untuk keluarga memiliki aturan: tempat yang paling atas digunakan untuk orang tua, selanjutnya dibawahnya untuk anak laki laki dan selanjutnya cucu laki-laki. Lebih lanjut dalam menentukan tatanan ruang permukiman ini, keterkaitan dan pemaknaan lingkungan juga memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya dilihat dalam hal lingkungan sekitarnya saja, akan tetapi juga dalam lingkup yang sangat luas seperti kedudukan dalam jagad raya, di bumi sampai dimana seseorang bertempat tinggal. Masyarakat Bali dalam menata ruang permukimannya sangat memperhatikan sistem orientasi. Pandangan hidup dasar mereka adalah adanya oposisi antara gunung dan laut atau *kaja* dan *kelod*. Gunung (Agung) merupakan tempat para dewa, sedangkan laut tempat para setan. Pada masyarakat di wilayah selatan, maka arah utara dan selatan seperti umumnya, akan tetapi masyarakat utara sebagai ‘utara’ adalah Gunung Agung di selatan, dan ‘selatan’ adalah laut di utaranya. Demikian juga dengan pelaksanaan ritual, dilakukan disekitar pembangunan rumah atau penetapan lokasi dan penentuan kapan mulai bisa ditempati. Kegiatan ini nampak mengambil dari



ide kosmologi hindu. Berbagai acara ini sudah tertulis, akan tetapi dalam prakteknya para tukang kayu sudah paham tentang acara semacam ini (Waterson 1990 dalam Sasongko 2005:2-3).

Secara khusus ritual ditunjukkan sebagai peristiwa publik yang ditampilkan pada tempat khusus (*sacred places*) atau pada waktu tertentu. Para ahli antropologi juga sering lebih mengkaitkan dengan ritual keagamaan dan masyarakat *preliterate* (Norget 2000 dalam Sasongko 2005:2-3). Salah satu bagian penting dalam ritual adalah *rites of passage* yang merujuk pada: kelahiran, puber, perkawinan, kematian, dan berbagai peristiwa krusial lain sebagai perubahan atau transisi dalam kehidupan seseorang. Dalam interaksinya dengan alam dan pemahaman atas keseimbangan alam baik sebagai makro kosmos maupun mikro kosmos, manusia melakukan berbagai rangkaian ritual yang dilakukan secara terus menerus. Diantara ritual bagian yang sangat penting adalah terkait dengan daur hidup.

Hoebel dan Frost menyatakan bahwa siklus hidup manusia pada dasarnya terdiri dari empat bagian, yakni, kelahiran, dewasa, bereproduksi dan mati. Pada berbagai budaya manusia acara ini selalu ada dengan berbagai variasi dan intensitas yang berbeda (Hoebel dan Frost 1976 dalam Sasongko 2005:2-3). Bagaimana peristiwa ritual mempengaruhi aktifitas masyarakat dan penggunaannya dalam ruang permukiman, salah satunya disampaikan oleh Hardie yang mempelajari masyarakat Tswana. Dalam hal ini kelahiran dan kematian yang memiliki signifikansi terhadap kedatangan dan kepergian ke dunia leluhur ini diamati memiliki hubungan dengan ruang disekitar dimana peristiwa tersebut terjadi. Pola ini mempengaruhi perilaku di dalam ruang pada saat tertentu, dan mengungkapkan kepercayaan tentang alam raya dan tatanan kosmis yang dipahami oleh masyarakat Tswana (Hardie 1985 dalam Sasongko 2005:2-3).

## 2.3 Tinjauan Tentang Pelestarian

### 2.3.1 Pengertian pelestarian

Istilah pelestarian diartikan beraneka ragam sesuai konsep dan persepsi masing-masing para ahli perkotaan. Berikut beberapa pengertian pelestarian yang dapat dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- Yuwono (1995:3) mengemukakan bahwa pelestarian berarti suatu tindakan pengelolaan atau manajemen suatu satuan wilayah perkotaan atau perdesaan sebagai suatu satuan organisme kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan dua tujuan orientasi, yaitu (1) tindakan pengelolaan sumber budaya atas lingkungan hidup

binaan yang dilaksanakan melalui proses politik; dan (2) tindakan untuk meningkatkan pendapatan.

- Danisworo dalam Budiharjo (1997:14) mengemukakan istilah pelestarian sebagai konservasi, yaitu upaya untuk melestarikan, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat, seperti gedung-gedung kuno yang memiliki arti sejarah atau budaya, kawasan dengan kehidupan budaya dan tradisi yang memiliki arti, kawasan dengan kepadatan penduduk yang ideal, cagar budaya, hutan lindung, dan sebagainya. Dengan demikian konservasi berarti pula preservasi, namun tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung/memberi wadah bagi kegiatan yang sama seperti kegiatan asalnya atau bagi kegiatan yang sama sekali baru, sehingga dapat membiayai kelangsungan eksistensinya.
- Makna pelestarian dalam Piagam Burra (*The Burra Charter, 1981*) merupakan proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat (Nasruddin, 2001:14)
- Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya. Selain itu konservasi juga diartikan sebagai payung dari seluruh tindakan pelestarian.

Berdasar pada pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian dalam penelitian ini adalah seluruh upaya/tindakan untuk memelihara, mengamankan dan melindungi sumber daya sejarah yang berbentuk bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat untuk kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan.

### 2.3.2 Lingkup pelestarian

Lingkup pelestarian dalam suatu lingkungan kota, objek digolongkan dalam beberapa luasan sebagai berikut (Sidharta & Budihardjo 1989:11-12) :

1. Satuan areal, adalah satuan yang dapat berwujud sub wilayah kota.
2. Satuan pandangan, adalah satuan yang dapat mempunyai arti dan peran yang penting bagi suatu kota. Satuan ini berupa aspek visual yang dapat memberi bayangan mental atau *image* yang khas tentang suatu lingkungan kota.
3. Satuan fisik, adalah satuan yang berwujud bangunan, kelompok atau deretan, rangkaian bangunan yang membentuk ruang umum atau dinding jalan.



Konsep konservasi tidak hanya mencakup monumen, bangunan atau benda arkeologis saja melainkan juga lingkungan, taman dan bahkan kota bersejarah. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992, pasal 1, lingkup objek pelestarian yang ditetapkan antara lain:

- a. Benda cagar budaya adalah:
  - Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
  - Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- b. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

### **2.3.3 Permasalahan dan kendala pelestarian**

Dalam upaya penjabaran strategi pembangunan berwawasan identitas, salah satu aspek yang sering terlupakan adalah pelestarian bangunan kuno/bersejarah, yang banyak terdapat di segenap pelosok daerah. Perhatian terlalu banyak dicurahkan pada bangunan baru, yang memang lebih mengesankan sebagai cerminan modernitas. Padahal dengan hilangnya bangunan kuno tersebut, lenyap pula lah bangunan dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah mencitakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya (Sidharta & Budihardjo 1989:3).

Sidharta & Budihardjo (1989:3) mengungkapkan bahwa kesinambungan masa lampau–masa kini–masa depan yang mengejawantah dalam karya-karya arsitektur setempat merupakan faktor kunci dalam penciptaan rasa harga diri, percaya diri dan jati diri atau identitas karena keberadaan bangunan kuno bersejarah tersebut mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Oleh karena itu, pelestarian bangunan kuno/bersejarah perlu untuk dilestarikan. Namun pada kenyataannya, kegiatan pelestarian sering mengalami benturan dengan kepentingan pembangunan, sehingga pelestarian dianggap sebagai penghalang pembangunan yang mengakibatkan timbulnya pertentangan–pertentangan dalam pelestarian.

Budiharjo (2005:210) mengungkapkan bahwa kendala konservasi adalah suatu permasalahan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan konservasi. Kendala yang klasik, yaitu keterbatasan dana dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut terjadi

karena dalam pelaksanaannya terdapat ketergantungan terhadap sumber dana tertentu, yakni subsidi pemerintah. Budiharjo mencontohkan kendala pendanaan dalam mengkonservasi bangunan–bangunan kuno di pusat Kota Lama Semarang. Dalam hal mengatasi kendala tersebut, dilakukan seni negoisasi dan transaksi *real estate*. Selain itu, yang menjadi permasalahan bahwa warisan budaya kota umumnya berada di pusat kota/menempati lokasi–lokasi yang strategis yang menyebabkan kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada kepentingan untuk konservasi. Ada baiknya dalam pengembangan kegiatan konservasi tersebut memadukan antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi tersebut dengan alih fungsi bangunan yang lebih sesuai, namun kegiatan baru tersebut tetap mempertahankan wujud asli bangunan serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Adhisakti *dalam* Hardiyanti (2005:22) menegaskan seringkali kendala dalam kegiatan pelestarian pusaka adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian, yang berdampak pada terhambatnya kelangsungan hidup politis pelaksanaan kebijakan pelestarian. Kurangnya keterlibatan masyarakat muncul sebagai dampak dari kurangnya pemahaman mendalam masyarakat terhadap kegiatan itu sendiri. Guna menentukan keterlibatan yang bisa dilakukan masyarakat adalah perlunya pendekatan persuasif secara berkesinambungan. Sebagai kajian awal, perlu dilakukan usaha untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap pentingnya memahami aspek kesejarahan yang terkandung dalam kawasan, persepsi terhadap pentingnya kegiatan pelestarian, dan persepsi terhadap perlunya keterlibatan masyarakat di dalam pelestarian. Kesamaan/keanekaragaman persepsi tersebut akan menentukan positif dan negatifnya penilaian terhadap persepsi yang ada. Persepsi masyarakat tersebut dinilai positif jika dapat mendukung jalannya kegiatan pelestarian, artinya adanya kesamaan persepsi di dalam masyarakat terhadap pentingnya memahami aspek kesejarahan yang terkandung di kawasan, persepsi terhadap pentingnya kegiatan pelestarian, dan persepsi terhadap perlunya keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pelestarian, begitu pula sebaliknya.

Permasalahan yang berkaitan dengan pertentangan perlu atau tidaknya pelestarian dapat digolongkan sebagai permasalahan makro pelestarian. Permasalahan makro yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pelestarian bangunan dapat dibedakan atas aspek ekonomi, sosial dan fisik. (Tabel 2.1)

**Tabel 2.1 Permasalahan Makro Pelestarian**

Aspek	Permasalahan
Ekonomi	a. Pelestarian dianggap menghambat mekanisme ekonomi pasar bebas sejak diadakan



Aspek	Permasalahan
	sistem legalisasi.
	b. Desain bangunan yang dilestarikan dianggap tidak efisien dan penggunaannya kurang ekonomis menjadi penghalang pembangunan gedung dan fasilitas yang lebih baik.
Sosial	a. Dipandang sebagai usaha pencegahan atas perbaikan lingkungan 'kelompok lemah' karena adanya halangan untuk membangun gedung dan fasilitas yang baru, pelestarian dianggap menyebabkan rakyat biasa harus melanjutkan tinggal dan bekerja dalam kondisi yang kurang.
	b. Hakekat pembangunan yang berhasil membawa perubahan pada pola pikir dan pandangan masyarakat sehingga dalam mengambil keputusan lebih menitikberatkan pada kepentingan efisiensi yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya.
Fisik	a. Usaha yang dilakukan para perencana maupun kelompok koservasi dalam mempertahankan bentuk fisik pada kawasan dianggap mengabaikan permintaan terhadap fasilitas perbelanjaan karena fasilitas perbelanjaan memerlukan area horizontal yang luas untuk ruang jual, ruang pameran dan parkir, sedangkan kawasan yang bernilai sejarah cenderung menyediakan unit-unit untuk pedagang eceran yang membutuhkan ruang sempit dalam bangunan vertikal.

Sumber: Gufron (1994:20-21); Yuwono (1996:2-3) dalam Krisna, 2005

Selain permasalahan pelestarian yang bersifat makro, di dalam penerapannya pelestarian juga menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian yang berkaitan dengan sistem pengelolaan warisan budaya, dengan perangkat terkait sebagai berikut: aspek legal, sistem administrasi, piranti perencanaan, kuantitas dan kualitas tenaga pengelola, serta pendanaan (Catanese & Snyder, 1992:429). Permasalahan mikro yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pelestarian dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Permasalahan Mikro Pelestarian**

Aspek	Permasalahan
Hukum	a. Hak-hak dan tanggung jawab apa yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam pelestarian bangunan? b. Seberapa jauhkah seharusnya pembatasan-pembatasan atas perubahan dalam bangunan-bangunan yang dilestarikan? c. Dapatkah pemerintah memaksa pemilik untuk melestarikan dan memelihara bangunan yang dilestarikan? d. Hak-hak apa yang dimiliki oleh pemilik dan penyewa dalam kaitannya dengan tanah? e. Siapakah yang berhak memperoleh keuntungan dan kerugiannya?
Pendanaan	a. Siapakah yang membiayai konservasi dan siapa yang memperoleh keuntungannya?
Pengelolaan	a. Siapakah yang berhak dan harus memutuskan apa yang dilestarikan, untuk berapa lama dan sejauh mana?

Sumber: Catanese & Snyder (1992:429) dalam Krisna 2005

Seiring dengan perkembangannya, permukiman-permukiman tradisional juga mengalami pergeseran atau perubahan. Menurut Altman dalam Krisna (2005:18), faktor – faktor penyebab perubahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar.

1. Pengaruh dari dalam

Perwujudan suatu rumah disebabkan oleh adanya dorongan dari berbagai kebutuhan manusia, sehingga perubahan kebutuhan atau kepentingan manusia itu sendiri akan menyebabkan adanya perubahan fisik.

2. Pengaruh dari luar

Kebutuhan hidup seseorang senantiasa berkaitan dengan lingkungannya, sehingga perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan hunian disebabkan oleh pengaruh luar yang diterima penghuninya.

Selain itu, perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi pada suatu permukiman tradisional disebabkan oleh adanya heterogenitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan pada fungsi bangunan, keberagaman etnis dan profesi yang mempengaruhi tata kehidupan dan pandangan hidup masyarakat dan tingkat kepadatan hunian yang tinggi mempengaruhi tradisi atau budaya bermukim, tatanan sosial budaya serta tata fisik lingkungan (Aliyah 2003:23).

Tindakan pelestarian bertujuan untuk menjaga karya seni sebagai saksi sejarah, dalam implementasinya sering kali berbenturan dengan kepentingan lain, yaitu pembangunan, sehingga timbul pertentangan-pertentangan dalam upaya pelestarian. Kritik yang sering dilontarkan adalah karena pelestarian sangat menghambat perubahan dan kemajuan, baik dari segi material maupun imajinasi, menurut Astuti *dalam* Risbiyanto (2006:28) hal tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu sebagai berikut :

- Adanya anggapan bahwa pelestarian sebagai penghambat pembangunan, kondisi demikian akan terjadi apabila suatu proses pembangunan dilihat sebagai proses perubahan, yaitu mengganti bangunan yang telah ada, maupun merubah struktur kawasan.
- Manfaat pelestarian kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Akibatnya tindakan pelestarian hanya dianggap membatasi dan merugikan pemilik bangunan maupun pengguna kawasan.

Beberapa contoh permasalahan dan kendala dalam kegiatan pelestarian yaitu:

1. Permasalahan pelestarian wisata budaya Dusun Sade

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelestarian pada kawasan wisata budaya di Dusun Sade dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Krisna 2005:143):

- Permasalahan makro berkaitan dengan adanya sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan upaya pelestarian yang ada, karena dianggap tidak



menguntungkan secara ekonomi serta membatasi hak mereka untuk mengubah bangunan tradisionalnya sesuai dengan kebutuhan dan selera.

- Permasalahan mikro berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian yang meliputi belum adanya penetapan batas-batas pelestarian yang berkekuatan hukum, belum adanya badan khusus pelestarian dan alokasi dana khusus untuk pemugaran bangunan tradisional, serta belum adanya pedoman desain, Perda tentang pengendalian aktifitas kawasan termasuk perubahan fisik yang terjadi, serta belum adanya koordinasi antar instansi terkait.

## 2. Permasalahan pelestarian pola perumahan *Taneyan Lanjhang* di Desa Lombang

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi menurut pendapat masyarakat terkait dengan upaya pelestarian pola perumahan *Taneyan Lanjhang* di Desa Lombang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, antara lain (Dewi 2008:264):

- a. Aspek ekonomi;
  - Masyarakat merasa takut dirugikan
  - Pemerintah ingkar terhadap perjanjian dalam pelaksanaan upaya pelestarian;
- b. Aspek sosial;
  - Masyarakat yang fanatik terhadap Islam sehingga tidak siap menghadapi resiko masuknya budaya yang tidak sesuai dengan Islam
  - Hilangnya budaya lokal seiring masuknya budaya asing
- c. Aspek fisik; dan
  - Terjadinya perubahan pola perumahan *Taneyan Lanjhang* yang telah ada
- d. Aspek hukum.
  - Meningkatnya kriminalitas sebagai dampak pelestarian;
  - Kesadaran masyarakat yang rendah

## 3. Permasalahan pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi menurut pendapat masyarakat terkait dengan upaya pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, antara lain (Patimah 2006:349):

- a. Aspek ekonomi;
  - Mahalnya biaya pembangunan yang diperlukan dan keterbatasan penghasilan.
- b. Aspek sosial;
  - Adanya pengaruh budaya asing.
  - Perubahan moral masyarakat
  - Perkembangan zaman.

c. Aspek fisik; dan

Permasalahan terkait dengan tata ruang tempat tinggal, diantaranya:

- Luas lahan yang sempit
  - Masih terdapat bangunan yang tidak terawat sehingga mengurangi nilai estetika
- Permasalahan terkait dengan tata ruang desa, diantaranya:
- Semakin tergesernya sarana-sarana adat yang diposisikan pada daerah pinggiran desa karena lokasi awal dimanfaatkan sebagai kawasan komersial.
  - Berubahnya kawasan Pempatan Agung yang seharusnya di bagian tenggara adalah lapangan, sekarang dimanfaatkan sebagai pasar.

d. Aspek hukum.

- Muncul masyarakat yang mensertifikatkan tanah Ayahan desa, padahal seharusnya tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan.

### 2.3.4 Persepsi masyarakat di kawasan pelestarian

Partisipasi masyarakat menurut Wibisana *dalam* Krisna (2005:44), diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan keuangan, pemikiran dan materi yang dibutuhkan. Menurut Wilson *dalam* Krisna (2005:44), keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendapat dalam *public hearing* yang diadakan untuk setiap rencana peremajaan suatu kawasan.

Widayati *dalam* Krisna (2005:44), menambahkan bahwa peran aktif masyarakat dalam suatu pelestarian merupakan hal yang penting karena hanya masyarakatlah yang mengetahui permasalahan serta apa saja yang dibutuhkan demi kesinambungan kawasan yang dilestarikan, yang dapat membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum menuju kearah partisipasi tersebut dibutuhkan kesamaan persepsi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian. Menurut Nur'aini *dalam* Krisna (2005:44), penyamaan persepsi masyarakat yang tinggal pada suatu kawasan pelestarian merupakan hal penting karena persepsi tersebut merupakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan pelestarian. Adapun kesamaan persepsi yang dimaksud dalam hal ini mencakup kesamaan terhadap keberadaan dan fungsi kawasan, pentingnya



aspek sejarah yang dikandung, pentingnya kegiatan pelestarian, serta perlunya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian.

Persepsi sendiri diartikan sebagai salah satu faktor psikologis yang sangat erat hubungannya dengan keberhasilan manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat. Devidoff *dalam* Krisna (2005:44), memandang persepsi sebagai salah satu proses yang antara satu dengan yang lain sifatnya berbeda (*individualistic*) dari apa yang diperkirakan orang, sehingga apa yang dipersepsikan oleh orang bisa secara substansial berbeda dengan kenyataan objek tersebut karena individu-individu melihat objek yang semu tapi memandangnya berbeda.

### 2.3.5 Arahan pelestarian

Arahan pelestarian bangunan dan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian secara fisik dan pelestarian secara non fisik. Arahan pelestarian secara fisik, terdiri dari teknik-teknik pelestarian yang sudah dikenal luas, seperti preservasi, konservasi, renovasi, dan sebagainya. Sementara itu arahan pelestarian secara non fisik merupakan upaya pelestarian yang bersifat ekonomi, sosial, dan hukum. Penjelasan mengenai masing-masing arahan pelestarian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Attoe *dalam* Dewi 2008: 63):

#### 1. Pelestarian fisik

Pelestarian bangunan yang bersifat fisik dapat dibagi dalam dua cara, yaitu penggunaan kembali yang adaptif dan petunjuk pelestarian.

##### a. Penggunaan kembali yang adaptif

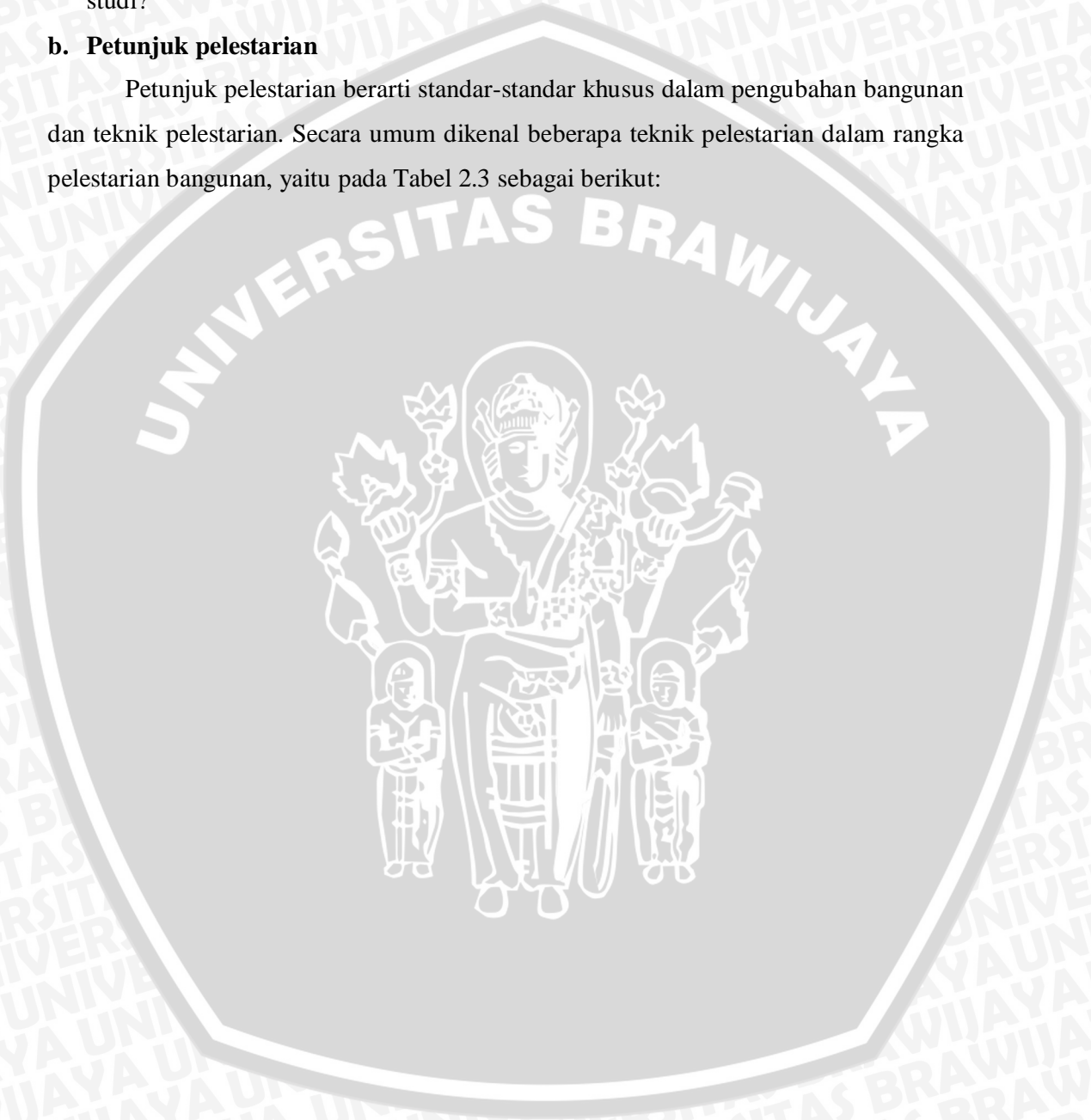
Bangunan-bangunan yang telah dipakai lebih lama daripada pemakaian aslinya serta tidak dilindungi, masih mempunyai kemungkinan berkembang melalui pemakaian kembali adaptif, misalnya: bekas gudang menjadi tempat perbelanjaan, bekas tempat pembuatan bir menjadi museum kesenian. Cara ini diimplementasikan melalui pemakaian kembali adaptif bangunan kuno dengan fungsi baru yang dapat ditunjang tindakan perubahan fisik. Pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam memutuskan fungsi yang dinilai sesuai untuk sebuah bangunan yang dilestarikan, yaitu sebagai berikut (Ross *dalam* Dewi 2008: 63):

- Apakah pemanfaatan ruang sekarang dari bangunan masih dapat dilakukan dengan atau tanpa modifikasi terhadap strukturnya?
- Apakah struktur bangunan cukup kuat? Jika tidak, bagian apa yang rapuh dan pemanfaatan apakah yang sesuai untuk keadaan demikian?

- Fungsi lain apakah yang sesuai dengan bangunan tersebut? Hal ini dilakukan dengan menanyakan kepada para pakar bangunan atau arsitektur mengenai fungsi apa yang dapat diterapkan dengan fisik atau struktur bangunan yang semula?
- Dana-dana apa saja yang tersedia dan apakah sesuai dengan kemungkinan hasil studi?

**b. Petunjuk pelestarian**

Petunjuk pelestarian berarti standar-standar khusus dalam perubahan bangunan dan teknik pelestarian. Secara umum dikenal beberapa teknik pelestarian dalam rangka pelestarian bangunan, yaitu pada Tabel 2.3 sebagai berikut:





Tabel 2.3 Teknik Pelestarian Bangunan

No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
1.	Preservasi	Merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.	Tindakan yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan berkala;</li> <li>▪ Pengecatan bangunan secara rutin;</li> <li>▪ Penggantian bangunan yang telah rusak/lapuk;</li> <li>▪ Penambahan ornamen pada bangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara fisik, strategi ini nyaris tidak mengakibatkan adanya perubahan atau sedikit sekali menimbulkan perubahan pada fisik bangunan (tingkat perubahan tidak ada/ sangat kecil).</li> <li>▪ Preservasi termasuk dalam cakupan konservasi.</li> <li>▪ Tergantung pada kondisi bangunan atau lingkungan yang akan dilestarikan, maka upaya preservasi biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, dan atau rekonstruksi.</li> </ul>
2.	Konservasi	Semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat guna mempertahankan nilai budayanya, dengan tetap memanfaatkannya untuk mewedahi kegiatan yang sama dengan aslinya atau untuk kegiatan yang sama sekali baru untuk membiayai sendiri kelangsungan keberadaannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan konservasi mencakup pemeliharaan sesuai kondisi setempat.</li> <li>▪ Konservasi suatu tempat merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya tempat tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konservasi sebenarnya merupakan upaya preservasi, tetapi tetap memperlihatkan dan memanfaatkan suatu tempat untuk menampung dan mewedahi kegiatan baru, sehingga kelangsungan tempat bersangkutan dapat dibiayai sendiri dari pendapat kegiatan baru.</li> <li>▪ Dapat meliputi preservasi, restorasi, renovasi, rekonstruksi maupun adaptasi.</li> <li>▪ Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan kecil).</li> </ul>
3.	Replikasi (peniruan)	Pembangunan bangunan baru yang meniru unsur-unsur atau bentuk-bentuk bangunan lama yang sebelumnya ada tetapi sudah musnah.	Dapat diterapkan untuk penambahan bangunan baru di sekitar bangunan atau kawasan peninggalan sejarah, yang dilakukan dengan memberikan persyaratan khusus pada bangunan baru tersebut, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan tinggi, volume;</li> <li>▪ Garis muka bangunan;</li> <li>▪ Bahan bangunan, warna; dan</li> <li>▪ Gaya/ langgam elemen bangunannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara umum teknik ini dilakukan untuk bangunan atau kawasan peninggalan sejarah yang selalu berkembang dan disekitarnya cukup tersedia lahan untuk pembuatan bangunan tambahannya.</li> <li>▪ Contoh: Gedung Sate di Bandung.</li> </ul>
4.	Renovasi (perombakan)	Tindakan mengubah sebagian maupun keseluruhan bangunan, terutama interior bangunan, sehubungan dengan adaptasi bangunan tersebut terhadap bangunan baru,	Cara ini biasanya dilengkapi dengan pembuatan dokumen dari bangunan lama yang dirombak, dan penyelematan terhadap beberapa bangunan dan objek – objek atau potongan-potongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Upaya ini biasanya disertai dengan konservasi dan gentrifikasi suatu bangunan atau lingkungan.</li> <li>▪ Teknik ini dapat pula berupa perombakan bangunan atau kawasan lama yang didasarkan pada</li> </ul>

Lanjutan Tabel 2.3 Teknik Pelestarian Bangunan

No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
		konsep-konsep modern atau dalam menampung fungsi baru.	(ornamen atau ciri lainnya) yang merupakan benda langka.	pertimbangan bahwa perombakan merupakan satu-satunya cara untuk memperpanjang umur bangunan, yaitu dengan membuat bangunan baru yang memperhatikan keserasian dengan bentuk bangunan lama di sekitarnya.
5.	Rehabilitasi	Pengembalian kondisi bangunan yang telah rusak atau menurun, sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.	Mementingkan bentuk bangunan asalnya, sehingga upaya penggantian terhadap elemen yang rusak dapat saja dilakukan dengan jenis bahan yang lain asal masih serasi dengan bahan lama yang masih ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contoh; Bank Perniagaan dan Bank Nasional di Kota Bandung.</li> <li>▪ Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan sedang).</li> <li>▪ Dapat mencakup alih guna bangunan (<i>adaptive reuse</i>) utama menjadi bangunan dengan fungsi baru.</li> </ul>
6.	Restorasi (pemugaran)	Upaya pengembalian kondisi suatu tempat atau fisik bangunan pada kondisi asalnya dengan membuang elemen-elemen tambahan dan memasang kembali bagian-bagian asli yang telah rusak atau menurun tanpa menambah unsur/ elemen baru ke dalamnya.	Teknik ini biasa dilakukan pada bangunan atau kawasan lama yang telah mengalami perubahan (kerusakan atau penambahan) dan pengganti yang sama masih tersedia serta mudah mendapatkannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Restorasi termasuk bentuk pelestarian yang paling konservatif.</li> <li>▪ Contoh: The Rock di Sydney, bekas kompleks penjara yang dijadikan kawasan pertokoan.</li> </ul>
7.	Rekonstruksi	Upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinal yang diketahui.	Teknik ini dapat berupa relokasi, yaitu membuat tiruan atau memindahkan bangunan di/ ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Hal demikian dapat dilakukan jika bangunan yang perlu dilindungi tersebut mempunyai tingkat kepentingan tinggi untuk dilindungi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam proses rekonstruksi bangunan dapat digunakan bahan baru atau lama.</li> <li>▪ Proses ini biasanya untuk mengadakan kembali bangunan atau kawasan yang telah sangat rusak atau bahkan yang telah hampir punah sama sekali.</li> </ul>
8.	Adaptasi (penyesuaian)	Segala upaya dalam mengubah suatu tempat, untuk menyesuaikan diri dengan fungsi baru yang menggantikannya.	Melakukan sedikit perubahan terhadap bangunan dan kawasan peninggalan sejarah yang dilestarikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara ini biasanya sangat mempengaruhi interior bangunan.</li> </ul>
9.	Subtitusi (pengalihfungsian bangunan)	Upaya mengganti fungsi bangunan bersejarah dengan status baru untuk meningkatkan kembali nilai dan fungsinya sesuai dengan kepentingan dan jamannya.	Teknik ini dilakukan bila bangunan/ kawasan yang akan dilestarikan mempunyai kepentingan perlindungan yang sangat tinggi, sehingga sejauh mungkin dihindarkan perubahan.	
10.	Benefisasi	Upaya meningkatkan manfaat suatu bangunan bersejarah yang semula tidak menarik menjadi berfungsi untuk kepentingan hidup manusia baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian,		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan untuk perpustakaan, museum atau pendidikan yang sesuai dengan sejarah dan bentuk bangunannya.</li> </ul>



Lanjutan Tabel 2.3 Teknik Pelestarian Bangunan

No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
11.	Perlindungan wajah bangunan	<p>periwisata dan rekreasi.</p> <p>Metode yang dilakukan bila ciri utama dari bangunan lama yang perlu dilestarikan terletak pada wajah bangunannya. Perombakan umumnya dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan.</p>	Dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan. Hal ini terutama dilakukan jika intensitas diamsukkan pada bangunan tersebut cukup tinggi dan perubahan tidak bisa dihindarkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh: bangunan Hotel Prenger di Jl. Asia Afrika, Bandung.</li> </ul>
12.	Perlindungan garis cakrawala atau ketinggian bangunan	Upaya yang dilakukan apabila bangunan/kawasan peninggalan sejarah yang akan diubah terletak di sekitar suatu ciri lingkungan sejak lama terbentuk di kota tersebut.	Dilakukan dengan membatasi ketinggian bangunan baru yang akan dibangun disekitar ciri lingkungan tersebut, sehingga tidak mengganggu pandangan kearahnya (dalam hal ini termasuk pandangan ke garis cakrawala di sekitar kawasan tersebut).	
13.	Perlindungan objek atau potongan	Upaya yang dilakukan terhadap ciri utama dari bangunan yang akan dirombak atau dihancurkan, sehingga perombakan yang dilakukan masih memperlihatkan bahwa pernah ada suatu bangunan atau kawasan lama tersebut.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik ini hanya dilakukan dalam keadaan mendesak, yaitu bila keutuhan bangunan sudah tidak dapat dipertahankan dan membahayakan keselamatan penghuninya.</li> </ul>
14	Demolisi	Upaya penghancuran atau perombakan suatu lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan.		

Sumber: Nurmala (2003: 38 – 40); Pontoh (1992: 34 – 35); Siregar (1998: 22 – 25); Setiawan (1988: 87 – 107) dalam Dewi (2008: 65-67)

## 2. Pelestarian non fisik

Secara non fisik, upaya pelestarian bangunan terdiri dari metode ekonomi, sosial, dan hukum.

### a. Metode ekonomi

Menurut Attoe dalam Dewi (2008: 68), metode ekonomi dalam pelestarian bangunan dan kawasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Insentif pajak

Insentif pajak yang dimaksudkan dapat berupa, antara lain:

- Pengurangan tarif pajak untuk bangunan bersejarah;
- Pembebanan pajak yang dibuat berdasarkan pemanfaatan bangunan yang ada, bukan berdasarkan pemanfaatan yang paling terbaik atau ideal.
- Pemberian ijin investasi pada bidang rehabilitasi atau suatu pembebanan perbaikan lingkungan bersejarah untuk menggantikan bagian dari suatu pembayaran pajak.

#### 2. Subsidi

Subsidi berupa pengurangan pendapatan pemerintah untuk menunjang tindakan pemeliharaan, baik dalam bentuk pemberian kredit, bantuan maupun penurunan harga.

#### 3. Pinjaman

Tersedianya pinjaman dari pemerintah maupun swasta dapat memperbesar peluang bagi terjadinya perlindungan lingkungan kuno. Pertambahan nilai dari bangunan dan lingkungan bersejarah dapat mengimbangi biaya peminjaman. Pinjaman dapat dikembangkan dengan bunga atau penjualan hak milik yang dijual atau diperbaiki dengan pinjaman itu.

#### 4. Pengalihan hak-hak membangun (*Transfer Development Right*)

Pengalihan hak membangun atau TDR adalah salah satu perangkat dalam proses perencanaan kota yang telah banyak dipakai di beberapa Negara bagian di Amerika Serikat yang dirancang untuk memberikan kompensasi kepada pemilik tanah atau bangunan yang haknya untuk mengembangkan tanah atau bangunannya dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku (Uno 1998 dalam Dewi 2008: 68). Penerapan pengalihan hak atas KLB ini diatur oleh suatu perangkat Panduan Rancang Kota agar manifestasi fisik yang kemudian terbentuk tidak akan merusak atau mengurangi makna dari asset budaya/ historis tersebut, tetapi akan memperkuat keberadaan asset tersebut di dalam kota. Konsep TDR merupakan suatu mekanisme untuk



mengendalikan desain yang inovatif dan mudah diadaptasi. Keuntungan dari konsep TDR, yaitu sebagai berikut:

- Konsep TDR memungkinkan pemilik bangunan untuk menjual hak-hak kepada yang bangunan lainnya antara luas dan pemanfaatan sesungguhnya dari bangunan tersebut. Hal ini dapat menunjang bangunan lainnya jika bangunan menurut peraturan zoning lokal. Hak-hak umumnya dipindahkan kepada bangunan baru di sekitarnya. Dengan demikian, pemilik bangunan memperoleh keuntungan karena mendapat kompensasi pertukaran hak dan melalui pajak yang rendah.
- TDR memberikan peluang pada pengembangan yang menyetujui untuk menggunakan hak membangun yang rendah pada suatu lokasi untuk memindahkan hak sisa ketinggian bangunannya kepada lokasi lain yang akan dibangunnya. Kedua lokasi tersebut dapat dalam berada jarak yang dekat ataupun tidak. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa kota yang membutuhkan kedekatan antara lokasi yang terletak dalam satu kawasan.

#### **b. Metode sosial**

Penerapan metode sosial berupa pemberian penghargaan dari pemerintah, publikasi, serta keanggotaan perkumpulan pemilik atau pengelola bangunan. Metode ini bertujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan moral kepada pemilik atau pengelola bangunan.

#### **c. Metode hukum**

Menurut Attoe *dalam* Catanese (1992:426–428), metode hukum yang digunakan sebagai metode perlindungan bangunan yang dilestarikan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pedoman desain (*design guidelines*)**

Pedoman ini digunakan untuk mengembalikan kemungkinan terjadinya desain dan konstruksi baru yang dinilai menyimpang dari karakter bangunan atau lingkungan kuno serta berpeluang merusak karakter tersebut.

##### **2. Zoning (penentuan wilayah)**

Suatu lingkungan yang telah ditetapkan sebagai lingkungan bersejarah dapat ditambahkan batasan-batasan tertentu khususnya bagi penggunaan bangunan dan konstruksi baru yang diperkenankan atau diijinkan.

##### **3. *Legal designation* (perlindungan yang sah)**

Perlindungan yang sah ini diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu pendaftaran yang transparan terhadap suatu kawasan, lingkungan, bangunan serta objek yang dinilai

harus dilestarikan pada tingkat nasional maupun internasional; pemeriksaan perubahan yang diusulkan pada bangunan tertentu; beberapa mekanisme pemeriksaan dalam menghentikan atau memperlambat proses perubahan.

#### 4. *Ownership* (kepemilikan)

Pedoman ini merupakan pengelolaan lingkungan maupun bangunan bersejarah (hak milik langsung dan permanen) yang dialihkan kepada suatu badan atau lembaga yang tertarik melakukan studi.

Menurut Uno (1998) dalam Dewi (2008:70), beberapa metode pelestarian non fisik yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut (Tabel 2.4):

**Tabel 2.4 Jenis Pelestarian Non Fisik**

Metode	Jenis pelestarian
Metode Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uang kompensasi</li> <li>▪ Pajak rehabilitasi</li> <li>▪ Keringanan membayar PBB</li> <li>▪ Pemberian pinjaman</li> <li>▪ Kemudahan perijinan pengalihan hak membangun (TDR)</li> <li>▪ Denda materi/ <i>penalty</i></li> </ul>
Metode Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pemberian penghargaan</li> <li>▪ teguran</li> <li>▪ keanggotaan perkumpulan pemilik/ pengelola bangunan kuno</li> </ul>
Metode Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencantuman bangunan kuno dalam daftar bangunan kuno/ bersejarah yang berkekuatan hukum</li> <li>▪ Ijin khusus bagi pengubahan fisik bangunan kuno/ bersejarah</li> <li>▪ Perjanjian yang membatasi</li> <li>▪ Pemulihan</li> <li>▪ Sanksi hukum (contoh: penjara)</li> <li>▪ Pihak ketiga dalam pengalihan hak kepemilikan dan perawatan bangunan</li> <li>▪ Penetapan area konservasi</li> <li>▪ Petunjuk pelestarian</li> </ul>

Sumber: Uno (1998) dalam Dewi (2008: 70)

Menurut Pontoh (1992: 39) kegiatan preservasi dan konservasi sebagai bagian dari pelestarian merupakan usaha meningkatkan kembali kehidupan lingkungan kota tanpa meninggalkan makna kultural maupun nilai sosial dan ekonomi kota. Arahan konservasi suatu kawasan berskala lingkungan maupun bangunan, perlu dilandasi motivasi budaya, aspek estetis dan pertimbangan segi ekonomis. Preservasi dan konservasi yang mengejawantahkan simbolisme, identitas suatu kelompok ataupun aset kota perlu dilancarkan. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya preservasi dan konservasi harus diintegrasikan dengan elemen-elemen perancangan perkotaan. Kegiatan preservasi dan konservasi sebagai media pengendali pemanfaatan lahan dan aset warisan kota, khususnya dalam peremajaan lingkungan kota, merupakan usaha revitalisasi kawasan yang diremajakan.



### 2.3.6 Contoh penerapan arahan pelestarian

Berikut ini merupakan beberapa arahan pelestarian untuk bangunan dan permukiman tradisional.

#### 1. Pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud

Arahan pelestarian yang diterapkan pada Desa Adat Ubud, yaitu sebagai berikut:

##### a. Fisik

###### ▪ Tata ruang makro

- upaya konservasi terhadap ruang maupun elemen–elemen ritual yang ada di Desa Adat Ubud, seperti ruang ritual, kawasan tebing, makam dan Pempatan Agung.
- Upaya preservasi dan konservasi terhadap bangunan–bangunan ritual, yaitu preservasi dilakukan pada pura yang difungsikan khusus sebagai tempat ritual, konservasi dilakukan pada pura yang telah berfungsi ganda yaitu sebagai tempat ritual dan komersil.

###### ▪ Tata ruang mikro

Arahan pelestariannya dibedakan menjadi tiga yaitu konservasi, preservasi, dan rehabilitasi/restorasi/adaptasi.

##### b. Non fisik

###### ▪ Secara ekonomi

Insentif pajak, alokasi dana bantuan dari pemerintah, menjalin kerjasama antara pemerintah (dinas dan adat) dengan pihak swasta, pemberian subsidi, pengenaan denda materi dan teguran, serta meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat.

###### ▪ Secara sosial:

Pemberian bonus, promosi, pengadaan forum, kemudahan perijinan, mempersiapkan SDM, pembinaan seni dan budaya serta pembinaan mental dan spiritual.

###### ▪ Secara hukum

Pengesahan dan penetapan perda cagar budaya, pendaftaran benda cagar budaya, pemberlakuan ijin khusus, penetapan aspek kelestarian dalam masterplan tata ruang kota, penyusunan panduan/pedoman perencanaan dan perancangan yang bersifat teknis, serta penyempurnaan *awig – awig* desa adat.

2. Pelestarian pola perumahan *Taneyan Lanjhang* pada permukiman di Desa Lombang  
Arahan pelestarian yang diterapkan pada Desa Lombang, yaitu sebagai berikut  
(Dewi 2008:269-271) :

a. Fisik

- Preservasi pada pola perumahan *Taneyan Lanjhang* yang nyaris tidak mengalami perubahan dari pola asli perumahan Madura dibandingkan pola lainnya yang ditemukan di Desa Lombang.
- Konservasi (rehabilitasi) pada pola yang mengalami perubahan. Perubahan terjadi teknologi serta perkembangan ekonomi, seperti mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang berpengaruh terhadap kondisi dan pemakaian masing-masing bangunan, sehingga bangunan dapur tidak lagi menjadi satu dan menampung aktifitas yang bersifat privat bagi kaum wanita.
- Konservasi (rekonstruksi) pada pola yang mengalami perubahan. Perubahan terjadi umumnya disebabkan oleh masuknya teknologi serta perkembangan ekonomi, seperti mata pencaharian dan tingkat pendapatan serta pengaruh budaya dari luar Madura.
- Konservasi pada pola yang sedikit mengalami perubahan. Perubahan terjadi umumnya disebabkan oleh penambahan jumlah bangunan rumah tinggal dan perkembangan ekonomi, seperti mata pencaharian dan tingkat pendapatan.

b. Non fisik

- Secara ekonomi  
Insentif pajak dan subsidi kepada Masyarakat yang masih mempertahankan pola perumahan *taneyan lanjhang* atau mau mengembalikan kondisi perumahannya yang mulai mengalami perubahan.
- Secara sosial  
Penerapan metode sosial berupa pemberian penghargaan dari pemerintah, publikasi, serta keanggotaan perkumpulan pemilik atau pengelola bangunan, di samping itu dapat pula dilakukan upaya penyuluhan terkait pelestarian pola perumahan *Taneyan Lanjhang* kepada masyarakat setempat terkait dengan kesadaran masyarakatnya, seperti mengenai aturan susunan *taneyan* dan arah penambahan bangunannya.
- Secara hukum:
  1. *Legal designation* (perlindungan yang sah). Perlindungan yang sah ini diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu pendaftaran yang transparan



terhadap suatu kawasan, lingkungan, bangunan serta objek yang dinilai harus dilestarikan pada tingkat nasional maupun internasional; pemeriksaan perubahan yang diusulkan pada bangunan tertentu; beberapa mekanisme pemeriksaan dalam menghentikan atau memperlambat proses perubahan dan menyusun serta menegaskan peraturan terkait pelestarian pola perumahan *Taneyan Lanjhang* di Desa Lombang sebagai aset wisata.

2. *Ownership* (kepemilikan). Pedoman ini merupakan pengelolaan lingkungan maupun bangunan bersejarah (hak milik langsung dan permanen) yang dialihkan kepada suatu badan atau lembaga yang tertarik melakukan studi.

3. Arahan pelestarian kawasan wisata budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah

Arahan pelestarian di Dusun Sade terdiri dari arahan fisik dan arahan non fisik (Krisna 2005:136-138).

a. Arahan fisik

Arahan fisik berkaitan dengan pola permukiman dan bangunannya, yang diantaranya:

- Pola permukiman yang berbentuk linear dengan rumah yang menghadap ke jalan dan antar rumah dipisahkan dengan gang.
- Orientasi rumah yang meghadap ke arah timur dan barat.
- Pendirian bangunan disesuaikan dengan tahapan sistematis berdasarkan kemampuan ekonomi.
- Pembangunan beruga sebagai ruang tamu.
- Penggunaan bahan-bahan yang berasal dari alam untuk material rumah.
- Tata ruang dalam.
- Untuk masing-masing bangunan diarahkan restorasi/pemugaran, rehabilitasi, dan replikasi.

b. Arahan non fisik

Arahan non fisik berkaitan dengan kegiatan ritual budaya dan pengembangan kesenian.

- Pengkoordinasian kegiatan ritual budaya dengan kegiatan wisata lain.
- Pemeliharaan dan pengembangan kegiata budaya
- Pembentukan wadah pelestarian budaya Sasak.

## 2.4 Studi – studi yang pernah dilakukan

Studi-studi yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, permukiman tradisional maupun desa adat yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Pelestarian Permukiman Tradisional Desa Adat Using Kemiren dapat dilihat pada Tabel 2.5. Berikut merupakan penjelasan hasil teori dari studi terdahulu yang dapat memberikan masukan untuk peneliti, terkait dengan pelestarian pola permukiman tradisional.

- **Bangunan tradisional Using**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Suprijanto (2002:14), maka diperoleh gambaran mengenai ruang dan bentuk rumah Using. Jenis ruang dapat dibedakan atas ruang utama, yaitu *bale-jrumah-pawon* (selalu ada); ruang penunjang, yaitu *amper*, *ampok*, *pendopo* dan *lumbung* (tidak selalu ada); *kiling* sebagai penanda teritori Using. *Bale* terletak di depan sebagai ruang tamu, ruang keluarga dan ruang kegiatan ceremonial; *Jrumah* terletak di tengah berfungsi sebagai ruang pribadi dan ruang tidur; dan *Pawon* terletak di belakang seolah terpisah dari *jrumah*, yang berfungsi sebagai dapur, ruang tamu informal dan ruang keluarga. Bentuk atap *Tikel Balung*, *Baresan*, dan *Cerocogan* merupakan indikator bentuk dasar rumah Using. Bentuk dasar rumah/bentuk atap tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu Jawa sebagai induk budayanya dengan perbedaan nama dan bentuk konstruksi yang lebih sederhana (Suprijanto,2002:15).

- **Pola permukiman tradisional**

Permukiman Tradisional Toraja memiliki 3 tipe, yaitu permukiman yang berada di dataran tinggi (puncak bukit atau gunung), permukiman yang berada di area yang terisolasi atau terpencil, dan permukiman yang berada di dataran rendah. Secara umum terdapat beberapa elemen penting dalam permukiman tradisional Toraja, yaitu: *tongkonan*, *lumbung* (*alang*), *kandang*, *kebun* (*pa'la'*), *rante*, *sawah*, dan *liang* (Syahmusir 2005:240-242).

Desa Adat Legian tergolong linear yang membujur arah Utara-Selatan. Secara fisik, pola desa Adat Legian terdiri dari *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. *Parahyangan* sebagai areal yang diperuntukkan bangunan suci seperti pura kahyangan tiga (*Puseh*, *Desa*, *Dalem*), *pawongan* adalah adanya warga desa dengan huniannya, dan *palemahan* berupa areal desa sebagai tempat bertani, berkebun dengan batas-batas geografis tertentu. (Setiada 2003:62-63).



Bentuk-bentuk pola permukiman yang ada di Desa Trowulan dikaitkan dengan perkembangan hunian, lingkungan dan fisik bangunan serta prasarana sebagai pelengkap permukiman (jalan, drainase, dan listrik) (Permatasari 2008:78-85).

Terbentuknya sebuah permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara keseluruhan dapat dilihat unsur-unsur ekistiknya. Karakteristik lokal pola perumahan *Taneyan Lanjhang* di Desa Lombang berdasarkan 5 elemen ekistik permukiman yang dapat ditemukan di Desa Lombang, antara lain *natural* (fisik alami), *man* (manusia), *society*, *shell*, dan *network* (Dewi 2008:100).

Pola permukiman masyarakat Ammatoa Kajang dapat diamati melalui tiga skala ruang, yaitu skala mikro yang mempelajari pola dan hubungan sebuah bangunan, skala semi makro yang mempelajari pola dan hubungan dalam sebuah dusun, dan skala makro yang mempelajari pola hubungan dalam wilayah Kajang (Machmud 2006:178-186).

Karakteristik pola tata ruang permukiman tradisional di Desa Adat Ubud, Kabupaten Gianyar terdiri dari dua variabel, yaitu variabel mikro (tempat tinggal) dan makro (desa). Sub variabel dari tempat tinggal yaitu proses pembangunan tempat tinggal, tata guna lahan pekarangan, pola pencapaian pekarangan, kondisi bangunan tempat tinggal, status kepemilikan, massa bangunan, usia dan fungsi tempat tinggal. Sub variabel dari desa (makro) berupa tipologi desa, peruntukan lahan desa, ruang budaya, sistem sirkulasi, dan perkembangan permukiman desa (Patimah 2006:108-109)

Pola tata ruang permukiman tradisional Gampong Lubuk Sukon, dipengaruhi oleh:

- a. Guna lahan;
  - Elemen pembentuk kawasan pedesaan (perairan, hutan, permukiman, pertanian, infrastruktur, tanah kosong).
  - Peletakan elemen (transek Gampong yang meliputi kondisi topografi, guna lahan, dan status kepemilikan tanah dan Pembagian ruang di Gampong Lubuk Sukon sesuai dengan tata peletakan elemen ruang permukiman tradisional).
- b. Ruang budaya (Berdasarkan aktifitas harian, Berdasarkan ritual); dan
- c. Pola tata ruang tempat tinggal (rumah dan pekarangan, struktur tata ruang tempat tinggal, pola tata bangunan) (Burhan 2008:172-188)

Kepercayaan supra natural masih nampak dalam kehidupan masyarakat Desa Puyung. Dalam menentukan orientasi bangunan khususnya arah dan hadap rumah.

Masyarakat Puyung masih melaksanakan berbagai ritual, sehingga struktur ruang permukiman dapat terbentuk dari berbagai ritual tersebut yang diantara yaitu ritual kelahiran, perkawinan, dan Maulid Nabi Muhammad (Sasongko 2004:3-4).

Pola permukiman di Pedukuhan Cora Cotto' terbentuk dari perilaku masyarakat dalam aktivitas sosial, budaya dan kebiasaan. Aktivitas yang timbul karena perilaku tersebut, menggunakan ruang dengan skala mikro (ruang rumah), meso (pekarangan), dan makro (dukuh/desa). Oleh karena itu, pola ruang yang terbentuk dalam permukiman Pedukuhan Cora Cotto' berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan (Eliana 2007:217).

Unsur-unsur warisan budaya yang terdapat di Kampung Kemlayan, yaitu situs bersejarah, klasifikasi bangunan, klasifikasi orientasi massa bangunan terhadap kondisi tapak, klasifikasi pembatas kapling bangunan, dan klasifikasi fungsi bangunan. Sedangkan elemen-elemen pembentuk Kampung Kemlayan, yaitu riwayat terbentuknya (legenda/sejarah kampung), tokoh yang membentuk tatanan dari suatu kekacauan, kelompok masyarakat dalam kesatuan tatanan bermukim, susunan tata massa bangunan, batas teritori wilayah kekuasaan pribadi (lahan), besaran lahan atau ukuran luas tapak, bentuk dan ukuran pagar, bentuk dan ukuran bangunan tempat tinggal (Aliyah 2004:34-39).

- Permasalahan pelestarian

Berdasarkan beberapa tinjauan pada studi terdahulu, permasalahan pelestarian permukiman yang terdapat di Dusun Sade, di Desa Lombang dan di Desa Adat Ubud memiliki kesamaan variabel yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek fisik dan aspek hukum {Krisna (2005:143), Dewi (2008:264), Patimah (2006:349)}.

- Arahan pelestarian

Arahan pelestarian secara fisik pada permukiman tradisional Desa Adat Ubud yaitu konservasi dan preservasi untuk tata ruang makro. Sedangkan untuk tata ruang mikro, yaitu konservasi preservasi dan rehabilitasi. Pelestarian fisik pada pola perumahan *Taneyan Lanjhang* adalah preservasi, konservasi, rehabilitasi, rekonstruksi. Arahan non fisik pada keduanya sama, yaitu secara ekonomi, sosial, fisik dan hukum.



**Tabel 2.5 Studi-studi Terdahulu**

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Manfaat
1.	Iwan Suprijanto (2002)	Rumah Tradisional Using: Konsep Ruang dan Bentuk	Mendapatkan gambaran mengenai ruang dan bentuk yang dianut pada rumah tradisional Using dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah tradisional</li> <li>• Keterkaitan antara konsep ruang dan bentuk</li> </ul>	Deskriptif	Mengetahui secara detail tentang konsep ruang dan konsep bentuk rumah Using serta faktor – faktor yang melatarbelakangi konsep dan bentuk tersebut.	Hasil yang diperoleh dapat memberi masukan tentang salah satu kebudayaan Using yaitu rumah tradisionalnya.
2.	Valentina Syahmusir (2005)	Pola Permukiman Tradisional Toraja: Studi Kasus Permukiman Tradisional Kaero	Mengetahui keterkaitan antar pola permukiman Kaero dengan pola permukiman tradisional Toraja beserta elemen pembentuknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe permukiman tradisional</li> <li>• Elemen – elemen permukiman</li> </ul>	Deskriptif	Mengetahui tipe permukiman pada permukiman tradisional Kaero beserta elemen – elemen yang melengkapi permukiman tersebut serta diperoleh gambaran tentang bentuk rumah hunian penduduk Kaero.	Pola permukiman dan bentuk rumah hunian dapat menjadi perbandingan dengan kondisi di wilayah studi
3.	Nengah Keddy Setiada (2003)	Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali	Mengetahui pola permukiman di desa adat Legian ditinjau dari pola desa tradisional Bali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola desa tradisional Bali</li> <li>• Pola desa Adat Legian</li> </ul>	Deskriptif evaluatif	Dalam perkembangan terkait dengan pariwisata, diketahui elemen – elemen permukiman tradisional yang masih ada di Desa Adat Legian sesuai dengan pola arsitektur permukiman tradisional Bali.	Memberikan masukan tentang elemen – elemen yang membentuk permukiman tradisional
4.	Ike Permatasari (2008)	Permukiman Perdesaan di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto	Memperoleh gambaran mengenai karakteristik sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, serta ruang fisik permukiman perdesaan di Desa Trowulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosial ekonomi dan sosial budaya</li> <li>• Ruang fisik permukiman perdesaan.</li> </ul>	pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan metode <i>deskriptif explanatory</i>	Karakteristik ruang fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya menunjukkan terdapat keterkaitan antara upacara adat dengan pola ruang hunian internal, hubungan kekerabatan dan lokasi lahan pertanian pada pola hunian eksternalnya (pola hunian dalam kelompok hunian).	Memberikan masukan mengenai karakteristik masyarakat yang terdapat dalam permukiman desa.
5.	Puspita Fitria Rahma Dewi (2008)	Pelestarian Perumahan <i>Taneyan Lanjhang</i> Pada Permukiman Di Desa Lombang	Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pola perumahan <i>taneyan lanjhang</i> pada permukiman di Desa Lombang, dan perubahan pola perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik perumahan <i>taneyan lanjhang</i></li> <li>• Faktor – faktor yang</li> </ul>	Deskriptif evaluatif	Karakteristik pola perumahan <i>Taneyan Lanjhang</i> dibedakan berdasarkan kelengkapan rumpun <i>taneyan</i> -nya. <i>Taneyan</i> difungsikan sebagai pengikat antar bangunan yang menunjukkan kekerabatan yang erat (matrilokalitas) serta sebagai orientasi dan arah	Mengetahui unsur-unsur kebudayaan yang berpengaruh terhadap pola tata ruang tradisional

Lanjutan Tabel 2.5 Studi-studi Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Manfaat
		Kabupaten Sumenep	<i>taneyan lanjhang</i> serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.	mempengaruhi perubahan		hadap bangunan. Perubahan pola perumahan <i>Taneyan Lanjhang</i> terjadi pada tiap periode pembangunan rumah tinggal.	
6.	Rini Krisna (2005)	Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah	Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik kawasan wisata budaya di Dusun Sade dan permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik permukiman</li> <li>• Aspek pelestarian bangunan</li> </ul>	Deskriptif	Karakteristik kawasan wisata budaya Dusun Sade dipengaruhi oleh kepercayaan Islam waktu telu, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian yaitu perbedaan persepsi masyarakat.	Mengetahui unsur-unsur kebudayaan yang berpengaruh terhadap pola tata ruang tradisional.
8.	Siti Patimah (2006)	Pelestarian Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Desa Ubud, Kab. Gianyar,	Mengetahui karakteristik sosial budaya dan pola tata ruang permukiman tradisional desa adat Ubud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik sosial budaya</li> <li>• Karakteristik pola tata ruang permukiman tradisional</li> <li>• Arah pelestarian</li> </ul>	Metode kuantitatif dengan wawancara dan kuisioner	Teridentifikasinya karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Ubud (pemerintahan, kelembagaan, kemasyarakatan, ekonomi, budaya dan religi) dan pola tata ruang permukiman tradisional Desa Ubud yang meliputi tata ruang desa (makro) dan tata ruang tempat tinggal tradisional (mikro). Serta Rekomendasi arahan untuk pelestarian permukiman tradisional Desa Ubud.	Memberikan kajian mengenai kondisi bangunan tradisional sebagai pembentuk pola tata ruang, serta Memberikan rekomendasi arah pelestarian untuk bangunan tradisional sebagai pembentuk pola tata ruang
9	Issana Meria Burhan (2008)	Pola tata ruang permukiman tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar	Mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat, mengidentifikasi pola tata ruang permukiman, dan menganalisis pola tata ruang permukiman tradisional Gampong Lubuk Sukon yang terbentuk akibat pengaruh sistem sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik sosial budaya</li> <li>• Pola tata ruang permukiman tradisional</li> </ul>	Deskriptif	Pola tata ruang permukiman di Gampong Lubuk Sukon dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya masyarakatnya yang beragama Islam. Elemen-elemen yang membentuk struktur ruang adalah perumahan dengan keluarga muslim. Sistem pengaturan ruang makro adalah pembagian ruang berdasarkan fungsi guna lahan yang terbentuk secara alami. Pada skala mikro, pola tata ruang permukiman terbentuk berdasarkan sistem kekerabatan, yaitu rumah orang tua menjadi bangunan inti	Memberikan masukan tentang keterkaitan karakteristik sosial budaya terhadap pola permukiman tradisional secara makro maupun mikro.

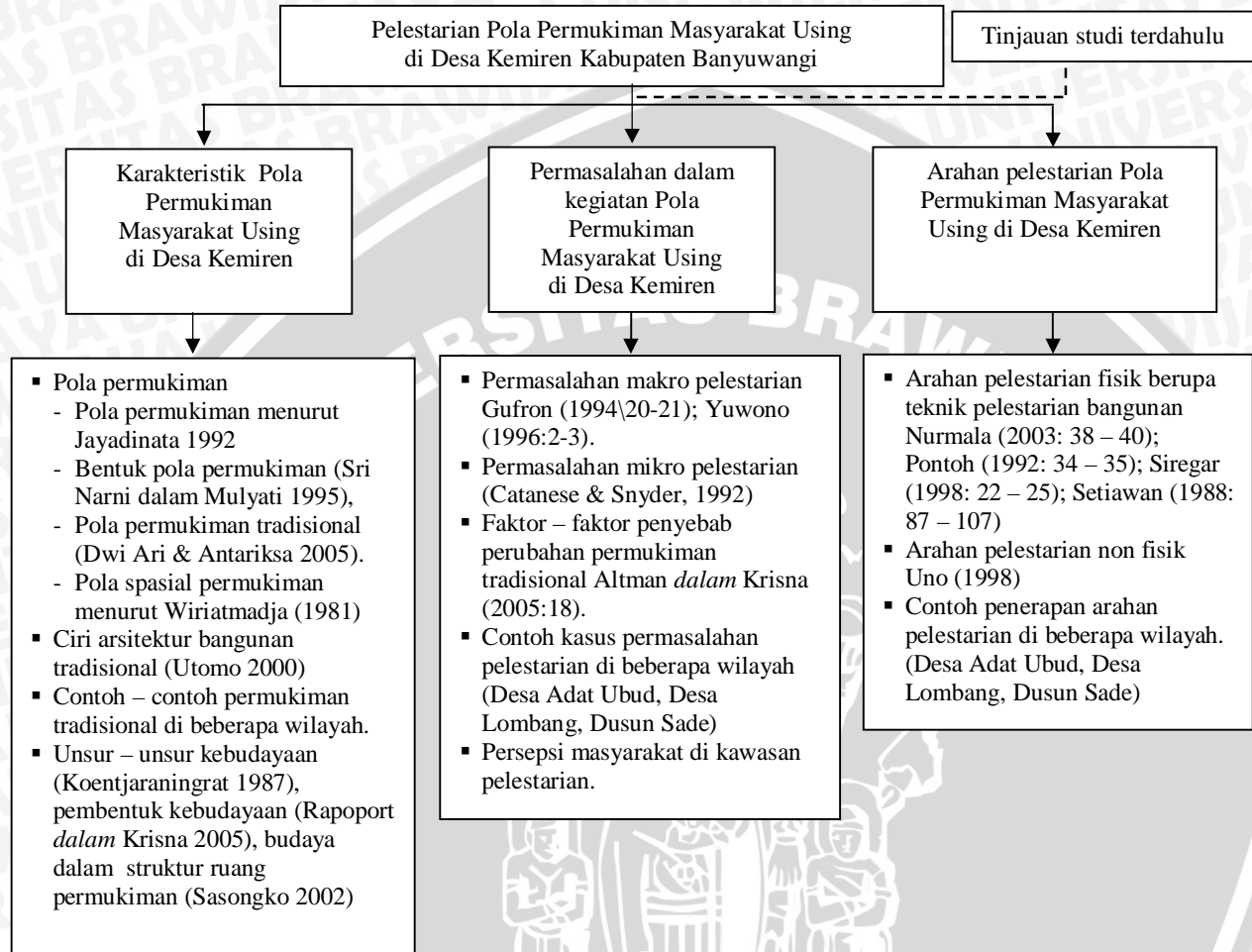


Lanjutan Tabel 2.5 Studi-studi Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Manfaat
			masyarakatnya.			(pusat) dari kelompok hunian suatu keluarga.	
10	Ike Eliana (2007)	Studi Pola Permukiman Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus: Pedukuhan Cora Cotto' Desa Sumbercanting Kab. Bondowoso	Membuat pola permukiman berdasarkan faktor budaya, sosial, dan kebiasaan/aktivitas sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur budaya</li> <li>• Unsur sosial</li> </ul>	<i>Behavior Mapping</i>	Pola-pola ruang yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya dan kebiasaan/aktivitas sehari-hari. Pola ruang pada permukiman dibagi dalam tiga skala ruang, yaitu skala mikro, meso dan makro pada tiap-tiap aktivitas yang telah dilakukan.	Memberikan gambaran tentang metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan pola ruang pada permukiman di wilayah studi berdasarkan perilaku masyarakat.
11	Ibnu Sasongko (2005)	Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya (Studi Kasus: Desa Puyung - Lombok Tengah)	Mengidentifikasi struktur ruang permukiman berdasarkan budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur ruang permukiman di desa puyung berdasarkan budaya</li> </ul>	Deskriptif	Pada permukiman Desa Puyung, satu rumah dengan rumah lain dalam satu rumpun keluarga diperhitungkan agar bisa menghadap lorong dalam rumpun keluarga. Masyarakat Puyung masih melaksanakan berbagai ritual diantaranya ritual yang mengalami peristiwa rutin dan tetap dipentingkan adalah terkait daur hidup, terdiri atas ritual: kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian, serta ritual terkait keagamaan, khususnya: Maulid Nabi Muhammad dan Lebaran Idul Fitri.	Memberikan masukan tentang keterkaitan budaya dengan struktur tata ruang permukiman tradisional.
12.	Istijabatul Aliyah (2004)	Identifikasi Kampung Kemlayan sebagai Kampung Tradisional Jawa di Pusat Kota.	Mengidentifikasi kelengkapan elemen pembentuk Kampung Kemlayan dan mengetahui faktor penyebab perubahan dan kerusakan elemen pembentuk Kampung Kemlayan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur - unsur warisan budaya</li> <li>• Elemen permukiman</li> <li>• Faktor penyebab kerusakan elemen pembentuk kampung</li> </ul>	Deskriptif	Adanya ketahanan elemen pembentuk Kampung Kemlayan, yaitu elemen yang berada pada bagian tengah di sekitar situs bersejarah masih tetap bertahan dan menjadi inti Kampung Kemlayan hingga sekarang. Sebaliknya bagian luar Kampung Kemlayan telah mengalami perubahan fisik akibat perkembangan kota yang akan berpengaruh pula terhadap ketahanan sosial budaya jawa.	Dapat memberikan masukan tentang unsur-unsur budaya yang terkait dengan permukiman tradisional dan elemen-elemen pembentuk permukiman tradisional.

## 2.5 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkuman teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan permasalahan (Gambar 2.12).



Gambar 2. 12 Kerangka Teori



Gambar 2. 1	Pola permukiman memusat.....	15
Gambar 2. 2	Bentuk pola permukiman.....	16
Gambar 2. 3	Tipe-tipe pola permukiman pedesaan.....	18
Gambar 2. 4	Permukiman Kaero.....	22
Gambar 2. 5	Sumber: Krisna (2005:130) .....	25
Gambar 2. 6	Pola permukiman Dusun Sade.....	25
Gambar 2. 7	Pola ruang Pedukuhan Cora Cotto'.....	26
Gambar 2. 8	Pola permukiman pola perumahan Taneyan Lanjhang di Desa Lombang. 27	
Gambar 2. 9	Hubungan kekerabatan permukiman di Desa Trowulan. ....	29
Gambar 2. 10	Pola perumahan yang berjajar dengan arah atap sejajar jalan. ....	29
Gambar 2. 11	(a) Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan ritual kelahiran; 30	
	(b) Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan ritual perkawinan; (c) Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan Maulid Nabi.....	30
Gambar 2. 12	Kerangka Teori.....	60
Tabel 2. 1	Permasalahan Makro Pelestarian .....	38
Tabel 2. 2	Permasalahan Mikro Pelestarian.....	39
Tabel 2. 3	Teknik Pelestarian Bangunan.....	45
Tabel 2. 4	Jenis Pelestarian Non Fisik.....	50
Tabel 2. 5	Studi-studi Terdahulu.....	57

